

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DALAM PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH  
MASYARAKAT**

(Studi Kasus di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**ANGGI DIPA PRATAMA  
NIM. 0810313005**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2013**

## MOTTO

Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!  
Soekarno-1945

Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.  
( *Benjamin Franklin* )



## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Juli 2013

Skripsi atas nama : Anggi Dipa Pratama

Judul : Implimentasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan

Sarana Air Bersih (Studi Kasus di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

DAN DINYATAKAN LULUS  
MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Anggota,

**Dr. Imam Hanafi, MSi**  
**NIP. 19691002 199802 1 001**

**Dr. Ryanto, M.Hum**  
**NIP. 19600430 198601 1 001**



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 26 Juni 2013

ANGGI DIPA PRATAMA  
0810310303



## RINGKASAN

Anggi Dipa Pratama, 2013. **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.** Dr. Imam Hanafi, MSi, Drs. Ryanto, M. Hum, 99 Halaman + x.

Implementasi Kebijakan pembangunan pada sektor air bersih di perdesaan dimaksudkan untuk membantu masyarakat perdesaan yang belum mempunyai akses terhadap air bersih yang aman dan layak. Sarana air bersih yang telah dibangun selanjutnya dikelola oleh masyarakat dengan membentuk lembaga yang disebut HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Tidak sedikit investasi prasarana dan sarana yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena mereka tidak membutuhkan, sebaliknya banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan prasarana dan sarana namun tidak mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan pembangunan sarana air bersih masyarakat desa dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan sarana air bersih di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan situs penelitian dilakukan di Desa Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat Desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan pembangunan sarana air bersih di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga HIPPAM di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan sarana air bersih adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi adalah : adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi, adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, persepsi pelaksana yang baik, HIPPAM. Sedangkan yang menjadi faktor

penghambatnya adalah : Belum adanya sosialisasi pembangunan sarana air bersih kepada masyarakat, rendahnya SDM.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Pembangunan sarana air bersih, masyarakat.



## SUMMARY

Anggi Dipa Pratama, 2013. **The Implementation of Government Policy in Developing Water Supply for the societies at Slahung District in Ponorogo Regency.** Dr. Imam Hanafi, MSi, Drs. Ryanto, M. Hum, 99 Pages + x.

---

Implementation of development policies in the water sector in the rural areas is intended to help rural communities who do not have access to safe water and decent. Water supply has been built further managed by the community by establishing an agency called HIPPAM (Association of Water Users). Not a bit of infrastructure investments that are not utilized by the community because they do not need, otherwise a lot of people in need of infrastructure and facilities but do not get service.

Based on the description above, the purpose of this study was to determine and describe the idea of how the implementation of the policy development of water supply and rural communities to identify the factors that influence the development of policy implementation of water supply in the district Ponorogo Slahung.

This study uses descriptive qualitative research approach, data collection techniques using interviews, documentation and observation. Location of the research conducted in the District Slahung Ponorogo and site research conducted in the village District Slahung Ponorogo.

The results showed that the implementation of development policies for Clean Water in Rural Community District Slahung Ponorogo went pretty smoothly. However, if it is linked to the achievement of objectives, the implementation of water supply for Development in Sub Slahung Ponorogo not optimal. Although the aim of improving governance, and social development, has been implemented in an optimal, but the goal of an increase in the capacity of HIPPAM in the village in the planning, implementation and control of development has not run optimally. Similarly, the goal of increasing participation in self-help mutual aid society is not optimal.

Some factors affecting the implementation of construction of water supply is communication, resource capability, attitude and implementing bureaucratic structure. Factor which acts as a support of communication, resource capability, attitude executor, bureaucratic structures are: socialization, the smoothness information, the consistency of policy, executive ability, perception of a good executive, HIPPAM. While the inhibiting factors are: Lack of socialization development of clean water to the community, lack of human resources.

Keywords: Implementation of policy, Development of clean water, community

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Sipil Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

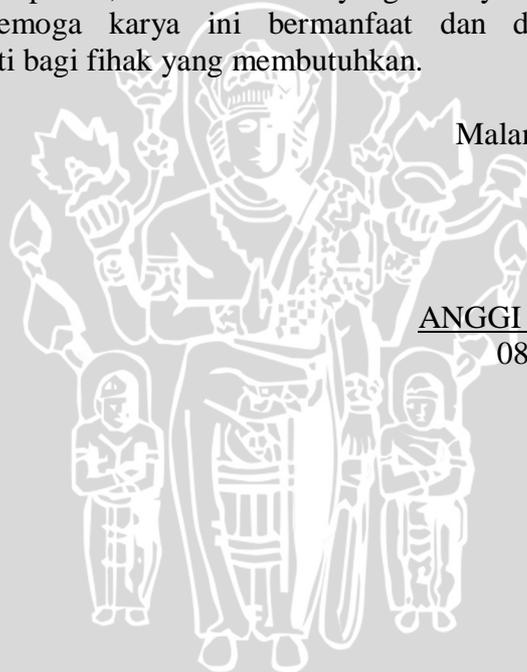
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono,MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. MR. Kahirul Muluk, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik
4. Bapak Dr. Imam Hanafi, MSi. , selaku Ketua Komisi Pembimbing
5. Bapak Dr. Ryanto, M. Hum, selaku Anggota Pembimbing
6. Bapak , selaku Penguji 1
7. Bapak , selaku Penguji 2
8. Para dosen dan seluruh staf Adiministrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama ini.
9. Camat Slahung Bapak Bambang Nurcahyo, M.Si, selaku camat Kecamatan Slahung.
10. Ibu Anik Setiowati, selaku Kepala Desa Slahung, dan pengurus HIPPAM desa Slahung.
11. Bapak V. Agung Suhardi, selaku Kepala Desa Caluk, dan pengurus HIPPAM desa Caluk.
12. Bapak Nanta Budi Harianto, selaku Kepala Desa Wates dan pengurus HIPPAM desa Wates

13. Bapak Lasmono selaku Kepala Desa Snepo yang telah membantu saya dalam mengetahui secara rinci keadaan desa dan pengurus HIPPAM desa Snepo.
14. Bapak, Ibu, adikku dan keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada henti dalam perjalanan hidupku sampai sekarang
15. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah menemani saya dan memberikan dukungan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk Teofilus Fernando Fiero, Hendri Setiawan.
16. Semua teman-teman FIA dan Nanda, Gopan atas pertemanan dan dukungannya

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 1 Juli 2013



Penulis.  
ANGGI DIPA PRATAMA  
0810313005

**DAFTAR ISI**

<b>MOTTO</b> .....	i
<b>TANDA PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	iv
<b>SUMMARY</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii

**Halaman**

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik .....	10
B. Implementasi Kebijakan Publik .....	12
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Publik .....	13
D. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) .....	20
1. Kebijakan dan Strategi Nasional tentang SPAM .....	20
2. Pengertian SPAM .....	21
3. Pengelolaan SPAM .....	22
4. Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM .....	22
5. DAK Infrastruktur Subbidang Air Minum .....	22
E. Pengelolaan .....	25
1. Pengertian Pengelolaan .....	25
2. Konsep Pengelolaan Air Bersih .....	26
3. Prinsip Manajemen Dalam Pengelolaan Air Bersih .....	27

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Instrument Penelitian.....	33
G.Keabsahan Data.....	34
H.Analisa Data.....	35

**BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

A.Gambaran Umum Penelitian .....	38
1. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Ponorogo.....	38
2. Gambaran Umum Kecamatan Slahung.....	41
3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum .....	43
B.Gambaran Umum Kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat.....	49
C.Penyajian Data	
1. Proses Implementasi Kebijakan.....	55
a. Penyusunan Rencana Kegiatan .....	55
b. Penyelesaian KegiatanPembangunan Sarana Air Bersih.....	57
c. Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih... ..	58
2. Pencapaian Tujuan Kebijakan.....	59
a. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, dan Kemasayarakatan.....	60
b. Kemampuan Lembaga HIPPAM desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.....	62
c. Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat.....	65
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi kebijakan Pembangunan Air Bersih Masyarakat .....	67
a. Komunikasi .....	67
b. Sumber Daya.....	71
c. Sikap Pelaksana.....	75
d. Struktur Organisasi Pelaksana.....	80
D. Pembahasan.....	84
1.Implementasi Kebijakan Pembangunan Srana Air Bersih.....	84
2.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat .....	88

**BAB V KESIMPULAN**

A.Kesimpulan.....	94
B.Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1	Rekapitulasi Pelayanan Air Bersih Kabupaten Ponorogo Samapai Dengan Tahun 2010 Per Kecamatan	6
2	Taxonomi Variabel yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Program	19
3	Batas Wilayah Kabupaten Ponorogo	38
4	22 Kelurahan Kecamatan Slahung	41
5	Daftar Pembangunan Sarana Air Bersih Kecamatan Slahung	56
6	Ketersediaan Air Bersih Di Kecamatan Slahung	58
7	HIPPAM Kecamatan Slahung	59
8	Kapasitas Air Bersih Penduduk Kecamatan Slahung	62

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal
1	Model Implementasi Menurut G. C. Edward III	15
2	Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn	17
3	Proses Implementasi Program menurut G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli	18
4	Komponen-komponen Analisi Data: Model Interaktif	37
5	Wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo	39
6	Peta Wilayah Kecamatan Slahung	42
7	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum	45
8	Sistem Pelayanan Air Bersih	52
9	Struktur Organisasi HIPPAM	55

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari sebuah Negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, memberikan perlindungan terhadap rakyat, dan juga menyelenggarakan ketertiban umum. Air bersih yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan secara berkelanjutan. Penggunaan air bersih sangat penting untuk konsumsi rumah tangga, kebutuhan industri dan tempat umum. Penanganan akan pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Hal ini juga diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 diamanatkan bahwa penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Pembangunan sektor air bersih di perdesaan dimaksudkan untuk membantu masyarakat perdesaan yang belum mempunyai akses terhadap air bersih yang aman dan layak, khususnya masyarakat miskin. Sarana air bersih yang telah dibangun selanjutnya dikelola oleh masyarakat dengan membentuk lembaga yang disebut HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Keterbatasan kemampuan pengelola HIPPAM, baik secara teknis maupun manajerial, diduga akan mempengaruhi keandalan sistem penyediaan air bersih di perdesaan.

Keadaan pelayanan diindikasikan dengan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air yang diterima oleh masyarakat pelanggan air.

Pada beberapa wilayah desa di Kabupaten Ponorogo ada yang teridentifikasi sebagai daerah rawan air, khususnya dimusim kemarau. Beberapa desa tersebut tidak memiliki sumber mata air sendiri, sehingga untuk memperoleh air minumannya terpaksa mengambil air dari luar desa baik dalam satu wilayah Kecamatan maupun berbeda wilayah Kecamatan. Beberapa desa rawan air di Kabupaten Ponorogo antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Pulung meliputi Desa Pulung Merdiko, Tegalrejo, Wagir Kidul, Bedrug, Karang Patihan dan Sidoharjo
2. Kecamatan Ngebel meliputi Desa Sempu dan Pupus
3. Kecamatan Sooko meliputi Desa Ngadirojo dan Klepu
4. Kecamatan Pudak meliputi Desa Krisik dan Bareng
5. Kecamatan Jetis meliputi Desa Mojomati, Kradenan dan Josari
6. Kecamatan Sambit meliputi Desa Ngasinan dan Gajah
7. Kecamatan Sawoo meliputi Desa Tumpuk, Tumpak Pelem dan Sriti
8. Kecamatan Mlarak meliputi Desa Kaponan, Totokan dan Serangan
9. Kecamatan Slahung meliputi Desa Ngilo-ilo, Wates, Senepo, Duri dan Tugurejo.
10. Kecamatan Balong meliputi Desa Ngendut, Muneng, Tatung, Purworejo dan Sedarat.
11. Kecamatan Bungkal meliputi Desa Pager, Bungu dan Padas.
12. Kecamatan Ngrayun Desa Sendang dan Binade. (*PDAM Kabupaten Ponorogo 2010*)

Peran pemerintah selanjutnya dalam pengelolaan kelembagaan air bersih berbasis masyarakat desa adalah untuk menjebatani agar kelembagaan semacam ini memberikan manfaat sosial dan ekonomi, dan membatasi timbulnya eksternalitas negatif. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005, tentang Sistem Pengembangan Air Minum, masyarakat diperbolehkan ikut serta dalam mengelola sumberdaya air, sehingga memberi ruang bagi penerapan pengelolaan berbasis masyarakat.

Hal ini sesuai juga dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air pada Bab I Pasal 5 menyatakan bahwa, “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif”. Karena kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tidak terbatas dan berkelanjutan. Sedangkan kebutuhan akan penyediaan dan pelayanan air bersih dari waktu ke waktu semakin meningkat yang terkadang tidak diimbangi oleh kemampuan pelayanan. Peningkatan kebutuhan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, peningkatan derajat kehidupan warga serta perkembangan kota/kawasan pelayanan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kondisi sosial ekonomi warga.

Pelayanan air minum di Wilayah perdesaan di Kabupaten Ponorogo secara umum telah dilayani dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan. Pelayanan air minum dengan perpipaan meliputi PDAM, HIPPAM, WSLIC-2 dan swadaya perpipaan, sedangkan sistem non perpipaan meliputi sumur gali maupun sumur pompa. Adapun Pelayanan Air Minum Kabupaten Ponorogo pada tahun 2009 dari total penduduk sejumlah 1.003.035 jiwa terlayani air minum sejumlah 440.952 jiwa atau 48,41 % yang meliputi HIPPAM 99.887 jiwa atau 11 %, WSLIC 63.033 jiwa atau 6,9 %, PDAM 130.978 jiwa atau 13,06 % dan Non Perpipaan 197.387 jiwa atau 21,7 %.

Tujuan dibangunnya prasarana penyediaan air bersih adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, menghindari penyakit yang berkaitan dengan pencemaran air serta meningkatkan kelestarian sumber daya alam. Penanganan

akan pemenuhan kebutuhan air bersih bisa dilakukan dengan dengan berbagai cara, biasanya disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada.

Penggunaan terminologi air bersih dalam pembangunan prasarana dan sarana air bersih yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum di satu sisi memberikan dampak positif bagi peningkatan cakupan pelayanan, namun di sisi lain mencerminkan ketidakefisienan investasi karena sebagian masyarakat pengguna tidak dapat memanfaatkannya sebagai air bersih walaupun desain prasarana dan sarananya telah memenuhi prasyarat air bersih.

Dari segi kuantitas pelayanan, lingkup pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan masih terbatas. Selain itu cakupan pelayanan juga masih terbatas sehingga tidak mampu mengimbangi laju kebutuhan akibat pertambahan jumlah penduduk. Sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki kemudahan tersebut adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang bertempat di kawasan perdesaan.

Kecenderungan ini terus meningkat setiap tahunnya. Pengalaman masa lalu juga menunjukkan adanya prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan terbangun yang tidak dapat berfungsi secara optimal. Karena minimnya melibatkan masyarakat sasaran, baik pada perencanaan, konstruksi ataupun pada kegiatan operasi. Selain itu, pilihan teknologi yang terbatas mempersulit masyarakat untuk dapat menentukan prasarana dan sarana yang hendak dibangun dan digunakan di daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan, budaya (kultur) setempat, kemampuan masyarakat untuk mengelola prasarana dan kondisi fisik daerah tersebut.

Kurangnya keterlibatan masyarakat juga menjadikan pelayanan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan yang terbangun menjadi tidak berkelanjutan, tidak dapat berfungsi dengan baik, dan tidak adanya perhatian masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana. Hal ini mengakibatkan prasarana dan sarana tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna secara berkelanjutan, seperti yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Slahung adalah desa Wates yang tidak bisa mengendalikan keberlanjutan sarana air bersih yang dibangun pemerintah. Tidak sedikit investasi prasarana dan sarana yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena mereka tidak membutuhkan, sebaliknya banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan prasarana dan sarana namun tidak mendapatkan pelayanan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari Pemerintah juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola HIPPAM dengan masyarakat. Hal ini saat dilakukan Musrenbang yang dihadiri hanya pengurus desa, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu pembangunan yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan hanya tahu kebutuhan air bersih mereka tercukupi. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian sarana air bersih.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Program Pelayanan Air Bersih**  
**Kecamatan Slahung**

No.	Desa	Jumlah Penduduk	HIPPAM		WS-LIC		PDAM		Non perpipaan		Ket.
			Jiwa	%0	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Senepo	2.917	146	5,0	-	-	-	-	-	-	-
2	Slahung	8.785	2.196	25,0	-	-	1.330	15,1	-	-	-
3	Wates	4.261	1.278	30,0	-	-	-	-	-	-	-
4	Ngilo-ilo	2.544	763	30,0	-	-	-	-	639	25,1	-
5	Tugurejo	4.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Caluk	2.080	213	7,0	-	-	-	-	-	-	-
7	Broto	1.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Menggare	1.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kambeng	2.784	-	-	-	-	-	-	1253	45,0	-
10	Duri	3.528	-	-	-	-	-	-	1.168	33,1	-
11	Ngloning	1.107	-	-	-	-	-	-	610	55,1	-
12	Plancungan	1.757	-	-	-	-	-	-	1.072	61,0	-
13	Jebeng	1.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Galak	1.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Truneng	906	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Simo	1.898	-	-	-	-	-	-	875	46,1	-
17	Crabak	2.154	-	-	-	-	-	-	1.031	47,9	-
18	Mojopitu	1.089	-	-	-	-	-	-	610	56,0	-
19	Gundik	2.044	-	-	-	-	-	-	1.093	53,5	-
20	Nailan	1.710	-	-	-	-	-	-	768	44,9	-
21	Gomambang	1.309	-	-	-	-	-	-	812	62,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	Janti	1.786	-	-	-	-	-	-	856	47,9		
Jumlah Penduduk		53.821										
Jumlah Penduduk Terlayani			4.596	9,5	-	-	1.330	2,5	10.787	20,0		
		Pelayanan Perkotaan PDAM + Non Perpipaan							1.330	2,47		
		Pelayanan Pedesaan HIPPAM+WS-LIC+Non Perpipaan							15.171	28,19		
		Total Jumlah Penduduk terlayani							16.501	30,66		

(Sumber: Pelayanan Air Bersih Kabupaten Ponorogo 2010)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas kiranya menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai latar belakang mengapa implementasi pemerintah dalam progam pembangunan air bersih yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih kurang berhasil. Maka tema penelitian ini yaitu **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)**

## B. Perumusan Masalah

Selanjutnya berdasar identifikasi masalah dalam efektivitas Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat Desa dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan sarana air bersih masyarakat desa di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan sarana air bersih?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi program dinas Pekerjaan Umum tentang pembangunan sarana air bersih untuk masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembangunan sarana air bersih masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Ponorogo, dapat dijadikan masukan dalam mengambil keputusan, perencanaan dan menyempurnakan peran pemerintah dalam pembangunan sarana air bersih.
2. Bagi masyarakat adalah sebagai bahan masukan pemahaman, bagaimana mengelola air bersih oleh masyarakat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Satmoko Yudo tahun 2009, dengan judul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih Dan Air Limbah Domestik*, pada penelitian tersebut

dijelaskan bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang baik, perlu didukung oleh perubahan *mind-set* dan *cultural-set*, serta penegakan unsur-unsur integritas, moralitas, etika, sosialisasi prinsip-prinsip *good governance* dan reformasi birokrasi, keteladanan, dan budaya kerja yang baik, efektif, efisien, dan produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Banu Adhibaswara tahun 2011, dengan judul Pengelolaan Air Secara Ekonomis Dengan Penggunaan Tanggul Batang Kelapa Serta Penjernih Air Alami Kontruksi pada penelitian ini menyimpulkan pengolahan air bersih yang dirancang merupakan konstruksi yang mudah terjangkau bagi masyarakat. Dari segi model rancangan, mudah untuk dilaksanakan dan dari segi bahan yang digunakan, mudah didapat di alam bebas. Walaupun demikian, jika tidak memungkinkan terdapat di alam dapat diperoleh dengan membeli, namun biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal yakni cukup ekonomis senilai Rp 727.000,00. Untuk biaya yang digunakan melalui pembelian adalah:

Ijuk 50kg @Rp 1.500/kg= Rp 75.000,00; Bambu 1m diameter 8 em 286 buah @ Rp 2.000 =Rp 572.000,00 (kalau tidak ditemukan di daerah setempat); Baut sekrup 572 buah, kira-kira 2 kg @Rp 30.000/kg =Rp 60.000,00; Eceng gondok 20 bonggol @1.000/bonggol =Rp 20.000,00; Total biaya = Rp 727.000,00

Hal ini membuktikan bahwa dengan biaya kecil dan material yang mudah diperoleh, bukan berarti tidak dapat menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

## BAB II

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut *“a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose”* (serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatankesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan (Islamy, 2001: 3 ).

Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. (Islamy, 1992: 17)

Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan

oleh Thomas R. Dye dalam (Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is what ever government chose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua “tindakan” pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, “sesuatu yang tidak dilaksanakan” oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun dikatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya (Islamy, 2001: 19).

Michael Howlet dan M. Ramesh (dalam Subarsono, 2005: 13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
2. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

3. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan. Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. Dan karena penelitian ini untuk melihat bagaimana kebijakan itu sampai pada sasaran atau tidak dan mengkaji bagaimana tujuan kebijakan itu maka implementasi kebijakan yang paling mendekati kajian penelitian ini.

## **B. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003:158). Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa

kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994: 15).

Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan) (Wahab, 2002: 59).

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, bahwa ”suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah (Winarno, 2002: 29).

Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut

perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target grup, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

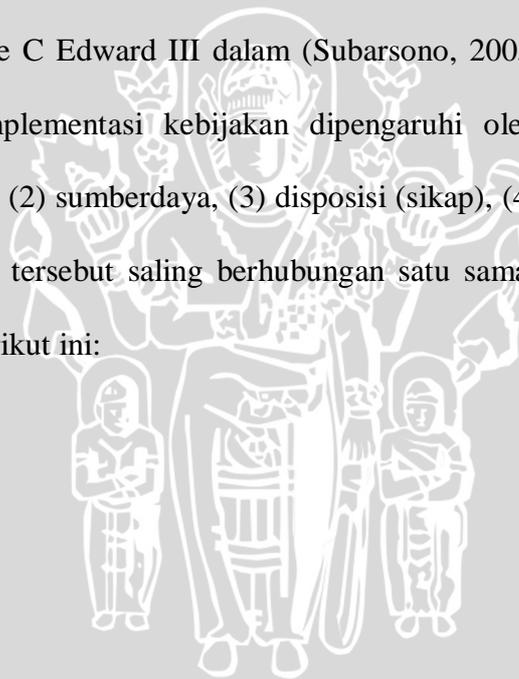
### **C. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan**

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1997: 71), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana.
2. Tersedia waktu dan sumber daya.
3. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan.
4. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.
6. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan.
7. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis.
9. Komunikasi dan koordinasi yang baik.
10. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

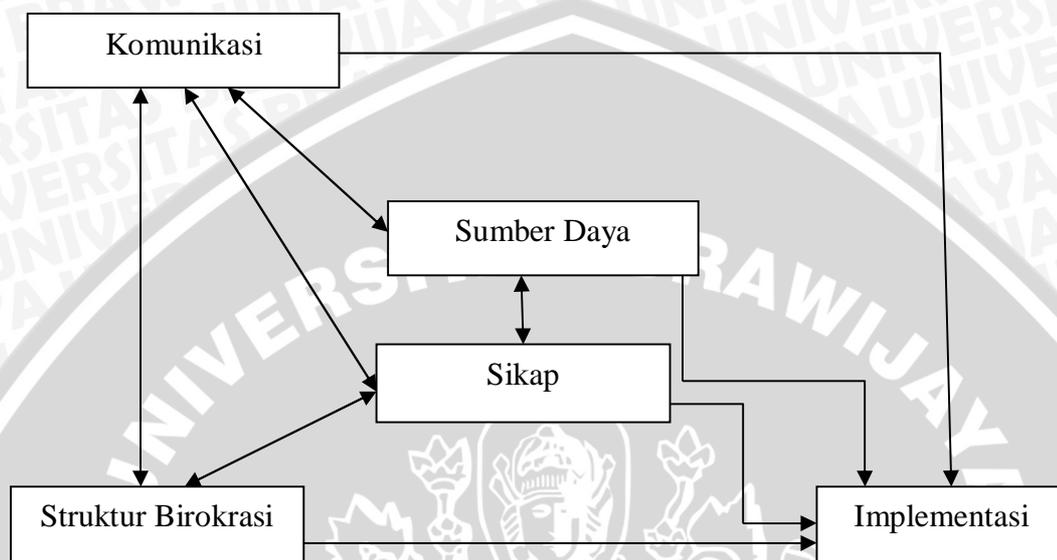
Menurut Grindle dalam (Wibawa, dkk., 1994: 15) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan George C Edward III dalam (Subarsono, 2005: 90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi. Dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 1

Model Implementasi Menurut G. C. Edward III



(Sumber: Subarsono, 2005: 91)

Dari bagan tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya.
2. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan.
3. Variabel Sumber-sumber: manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana.

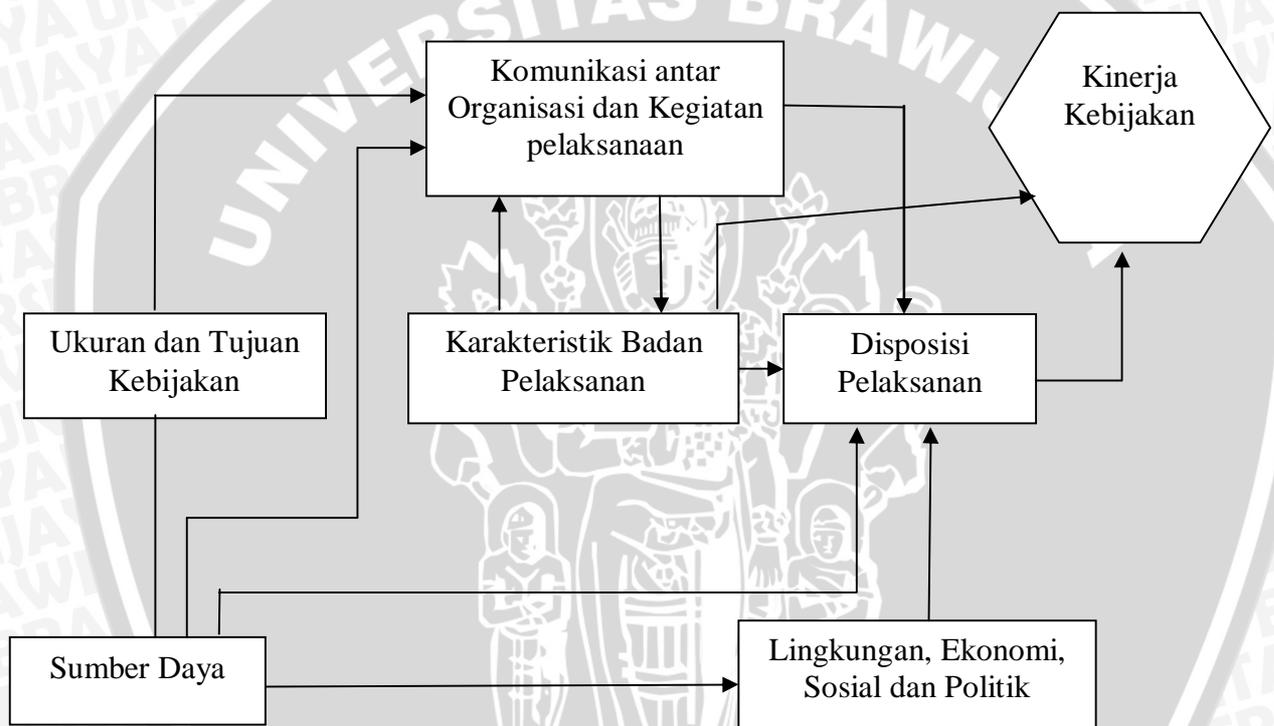
Adapun Van Metter dan Van Horn dalam (AG. Subarsono, 2005: 99) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan.

2. Sumberdaya.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.
4. Karakteristik agen pelaksana.
5. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Model implementasi kebijakan dari Van Matter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2  
Model Implementasi Kebijakan Van Matter dan Van Horn



(Sumber: Subarsono, 2005: 100)

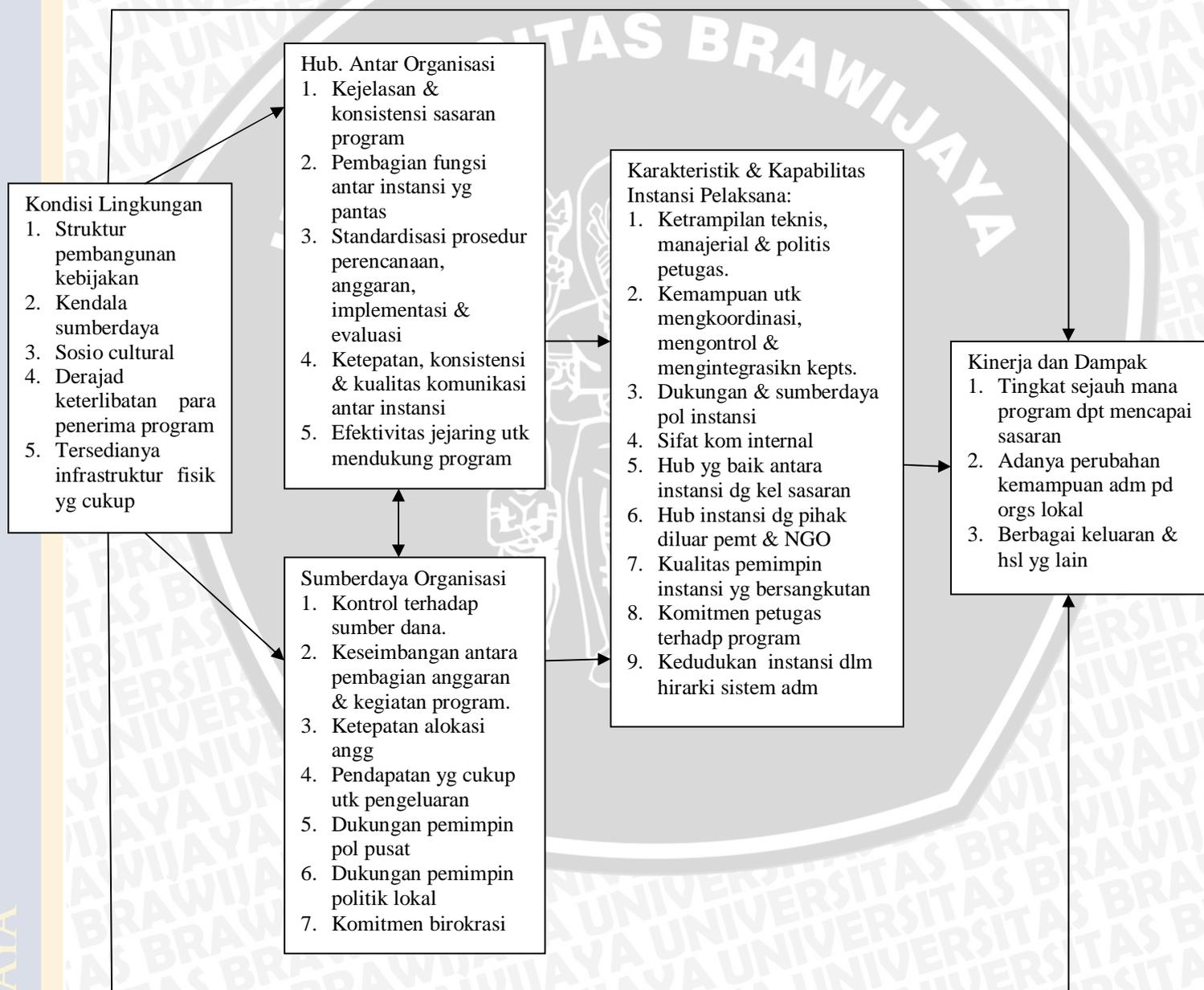
Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (AG.Subarsono, 2005: 101) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu:

1. Kondisi lingkungan.
2. Hubungan antar organisasi.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program.
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Proses implementasi program dari G. Shabir Cheema dan Dennis A.

Rondinelli dalam (Subarsono, 2005: 102) sebagaimana gambar berikut :

Gambar 3  
Proses Implementasi Program menurut G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli



(Sumber: Subarsono, 2005: 102)

Berdasarkan pendapat para ahli terkait dengan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik di atas dapat dijabarkan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 2  
Taxonomi Variabel yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Program

George C. Edward III	Van Metter & Van Horn	Chema & Rondinelli
Disposisi (sikap)	Pelaksana	Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana
Sumberdaya	Sumberdaya	Sumberdaya organisasi
Komunikasi	Komunikasi	Hubungan antar organisasi
Struktur organisasi		

Berdasarkan taxonomi variabel yang berpengaruh terhadap implementasi program maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu sikap pelaksana, sumberdaya, komunikasi, struktur organisasi, lingkungan dan standard serta sasaran.

#### 1. Komunikasi

Berdasarkan variabel yang berpengaruh terhadap implementasi program maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu sikap pelaksana, sumberdaya, komunikasi dan struktur organisasi.

Menurut Wiratmo dkk. (1996: 220), komunikasi adalah proses berbagi informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya. Komunikasi merupakan keterampilan manajemen yang sering digunakan dan sering disebut sebagai satu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi

keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tahu bagaimana mereka berkomunikasi.

Selanjutnya Kenneth dan Gary (dalam Umar, 2001: 25), mengemukakan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Komunikasi dalam organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antarpribadi dan komunikasi organisasi.

Sejalan dengan itu menurut Widjaja (2000: 88) komunikasi adalah "proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku".

Tujuan komunikasi keorganisasian antara lain untuk memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan balik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan, mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar-masuk dengan pihak-pihak luar organisasi. Hal ini bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama didalam kelompok atau organisasi yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi.

Sedangkan arah komunikasi di dalam suatu organisasi antara lain (Umar, 2001: 27):

- a. Komunikasi ke bawah, yaitu dari atasan ke bawahan, yang dapat berupa pengarahan, perintah, indoktrinasi, inspirasi maupun evaluasi. Mediana bermacam-macam, seperti memo, telepon, surat, dan sebagainya.

- b. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Fungsi utamanya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang aktivitas-aktivitas dan keputusan-keputusan yang meliputi laporan pelaksanaan kerja, saran serta rekomendasi, usulan anggaran, pendapat-pendapat, keluhan-keluhan, serta permintaan bantuan. Mediana biasanya adalah laporan baik secara lisan maupun tertulis atau nota dinas.
- c. Komunikasi ke samping, yaitu komunikasi antar anggota organisasi yang setingkat. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan kerja sama dan proaktif pada tingkat mereka sendiri, di dalam bagian atau antar bagian lain yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah maupun menceritakan pengalaman mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.
- d. Komunikasi ke luar, yaitu komunikasi antara organisasi dengan pihak luar, misalnya dengan pelanggan dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:157) mengemukakan tiga variabel yang penting untuk diperhatikan yaitu:

1. Transmisi.  
Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan.  
Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
3. Konsistensi.  
Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi. Faktor

kedua yang mempengaruhi komunikasi adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Dikaitkan dengan penelitian implementasi kebijakan HIPPAM, maka fenomena yang digunakan untuk mengukur komunikasi adalah:

- a. Intensitas sosialisasi kebijakan HIPPAM
- b. Kejelasan komunikasi kebijakan HIPPAM dari para pelaksana.
- c. Konsistensi perintah-perintah kebijakan HIPPAM.

## 2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang

penting dalam melaksanakan kebijakan publik (Winarno, 2002: 132). Lingkungan merupakan sumber pemasok *input* bagi organisasi, dan juga sebagai penerima *output* dari organisasi itu sendiri. Dari lingkungan suatu organisasi memperoleh bahan-bahan (material) yang diperlukan, baik fisik maupun non-fisik, dan dari lingkungan juga organisasi menangkap cita-cita, tujuan, kebutuhan, dan harapan.

Unsur manusia di dalam organisasi, mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusialah yang bisa mengetahui *input-input* apa yang perlu diambil dari lingkungan, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan atau menangkap *input* tersebut, teknologi dan cara apa yang dianggap tepat untuk mengolah atau mentransformasikan *input-input* tersebut menjadi *output-ouput* yang memenuhi keinginan lingkungan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan

yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Dengan demikian, dalam organisasi terdapat kurang lebih tiga variabel utama, yang mempengaruhi organisasi, yaitu staf, wewenang dan informasi, yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, dan masing-masing memiliki karakteristik atau nilai-nilai tertentu. Winarno (2002: 138) juga menyebutkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka fenomena yang akan dilihat dalam sumber-sumber yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan HIPPAM adalah:

- a. Kemampuan Sumber daya manusia pelaksana HIPPAM.
- b. Pendukung kebijakan sarana air bersih.
3. Sikap

Sikap adalah merupakan reaksi yang timbul atas suatu rangsangan dari situasi atau seseorang (Adam, 2000: 36), sedangkan Gibson (1993: 57) mendefinisikan sikap sebagai berikut "Sikap (*attitude* ) adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya". Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan

bahwa sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak.

Ada tiga komponen dalam sikap seseorang, yaitu (Mar'at, 1982: 13) Komponen kognitif yang hubungannya dengan kepercayaan, ide dan konsep, Komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang, Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. Namun di samping itu evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya berhubungan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang. Sehingga komponen kognisi melukiskan obyek tersebut, dan sekaligus dikaitkan dengan obyek-obyek lain di sekitarnya. Hal ini berarti adanya penalaran pada seseorang terhadap obyek mengenai karakteristik (Mar'at, 1982: 13).

Berdasarkan evaluasi tersebut maka komponen afeksi memiliki penilaian emosional yang dapat bersifat positif atau negatif. Berdasarkan penilaian ini maka terjadilah kecenderungan untuk bertingkah laku hati-hati. Komponen afeksi yang memiliki sistem evaluasi emosional mengakibatkan timbulnya perasaan senang/tidak senang atau takut/tidak takut. Dengan sendirinya pada proses evaluasi ini terdapat suatu valensi positif atau negatif. Oleh karena itu pada seseorang yang tingkat kecerdasannya rendah, kurang memiliki aspek penalaran

yang baik, dan dalam evaluasi emosionalnya pun kurang adanya kehalusan sehingga mengakibatkan kecenderungan tingkah laku yang kurang serasi (kasar).

Dikaitkan dengan penelitian ini maka fenomena yang digunakan untuk mengukur sikap adalah:

- a. Persepsi pelaksana terhadap kebijakan HIPPAM.
- b. Respon pelaksana kebijakan HIPPAM.
- c. Tindakan pelaksana kebijakan HIPPAM.

#### 4. Struktur Birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif, Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, (dalam Soekanto, 1982: 293).

Menurut Max Weber (dalam Soekanto, 1982: 293) ciri-ciri birokrasi dan cara terlaksananya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum, yaitu ketentuanketentuan hukum dan administrasi:
  - 1) Kegiatan-kegiatan organisasi sehari-hari untuk kepentingan birokrasi dibagi-bagi secara tegas sebagai tugas-tugas yang resmi.
  - 2) Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas resmi diberikan secara langsung dan terdapat pembatasan-pembatasan oleh peraturan-peraturan mengenai cara-cara yang bersifat paksaan, fisik, keagamaan dan sebaliknya, yang boleh dipergunakan oleh pada petugas.
  - 3) Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak. Hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan umum yang dapat dipekerjakan.
- b. Prinsip pertingkatan dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas perihal hubungan atasan dengan bawahan di mana terdapat pengawasan

terhadap bawahan oleh atasannya. Hal ini memungkinkan pula adanya suatu jalan bagi warga masyarakat untuk meminta agar supaya keputusan-keputusan lembaga-lembaga rendah ditinjau kembali oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi.

- c. Ketatalaksanaan suatu birokrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis yang disusun dan dipelihara aslinya atau salinannya. Untuk keperluan ini harus ada tata usaha yang menyelenggarakan secara khusus.
- d. Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan dan keahlian yang khusus dari para petugas.
- e. Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatan meminta kemampuan bekerja yang maksimal dari pelaksana-pelaksananya, terlepas dari kenyataan bahwa waktu bekerja pada organisasi secara tegas dibatasi.
- f. Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang bersifat langgeng atau kurang langgeng, sempurna atau kurang sempurna, yang kesemuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan peraturan-peraturan memerlukan cara yang khusus yang meliputi hukum, ketatalaksanaan administrasi dan perusahaan.

Dengan memperhatikan ciri-ciri yang telah diuraikan oleh Max Weber, maka dapat dikatakan bahwa birokrasi paling sedikit mencakup 5 (lima) unsur, yaitu (Soekanto, 1982: 293):

- a. Organisasi.
- b. Pengerahan tenaga.
- c. Sifatnya yang teratur.
- d. Bersifat terus menerus.
- e. Mempunyai tujuan.

Menurut Sutarto (1995: 40) organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat diketemukan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut saling kait merupakan suatu kebulatan. Setiap organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga jelas organisasi yang dimaksud. Struktur organisasi akan nampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi. Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan

satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh (Sutarto, 1995: 41).

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh struktur organisasi yang sehat dan efisien, pada waktu membentuk harus memperhatikan berbagai asas organisasi (Sutarto, 1995: 43).

Menurut Steers (1985: 70) sekurang-kurangnya ada enam faktor struktur yang dapat dikenali, yang ternyata mempengaruhi beberapa segi implementasi kebijakan organisasi. Keenam faktor ini adalah: (1) tingkat desentralisasi, (2) spesialisasi fungsi, (3) formalisasi, (4) rentang kendali, (5) ukuran organisasi, dan (6) ukuran unit kerja. Sedangkan Robbins (2006: 585) menyebutkan ada enam unsur kunci untuk merancang struktur organisasi, yaitu spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi.

Desentralisasi adalah batas perluasan berbagai jenis kekuasaan dan wewenang dari atas ke bawah dalam hierarki organisasi. Dengan demikian pengertian desentralisasi berhubungan erat dengan konsep partisipasi dalam pengambilan keputusan. Makin luas desentralisasi makin luas ruang lingkup bawahan dapat turut

serta dalam dan memikul tanggung jawab atas keputusan-keputusan mengenai pekerjaan mereka dan kegiatan mendatang dari organisasinya (Steers, 1985: 71).

Spesialisasi adalah pembagian fungsi-fungsi organisasi menjadi kegiatan-kegiatan yang sangat khusus. Spesialisasi dapat diukur dengan berbagai cara, mencakup jumlah divisi dalam sebuah organisasi dan jumlah bagian dalam setiap divisi, jumlah posisi yang berlainan dan jumlah sub unit yang berbeda dalam sebuah organisasi, dan jumlah pekerjaan dan jabatan yang terdapat dalam sebuah organisasi. Spesialisasi memungkinkan setiap pekerja mencapai keahlian di bidang tertentu sehingga dapat memberikan sumbangan secara maksimal pada kegiatan ke arah tujuan (Steers, 1985: 74).

Formalisasi menunjukkan batas penentuan atau pengaturan kegiatan kerja para pegawai melalui prosedur dan peraturan yang resmi. Semakin besar pengaruh peraturan mengatur tingkah laku pekerja, semakin besar tingkat formalisasinya. Peningkatan formalisasi merupakan penghalang bagi implementasi kebijakan karena para manajer dalam struktur yang sangat formal akan cenderung melakukan segala sesuatu sesuai peraturan (Steers, 1985: 75).

Rentang kendali (rentangan kontrol) adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan tertentu. Bawahan langsung adalah sejumlah pejabat yang langsung berkedudukan di bawah seorang atasan tertentu. Atasan langsung adalah seorang pejabat yang memimpin langsung sejumlah bawahan tertentu (Sutarto, 1995: 172).

Menurut Sutarto (1995: 174), ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa sebaiknya jumlah pejabat bawahan yang langsung dapat dipimpin dengan baik oleh seorang pejabat atasan tertentu, yaitu:

- a. Faktor subyektif, yaitu faktor yang melekat pada pejabatnya, misalnya: kepandaian, pengalaman, kesehatan, umur, kejujuran, keahlian, kecakapan, dan lain-lain.
- b. Faktor obyektif, yaitu faktor yang berada di luar pejabatnya, misalnya: corak pekerjaan, jarak antar pejabat bawahan, letak para pejabat bawahan, stabilitasnya organisasi, jumlah tugas pejabat, waktu penyelesaian pekerjaan.

Besarnya ukuran organisasi dapat mempengaruhi berbagai aspek keberhasilan organisasi. Bertambah besarnya ukuran organisasi tampaknya mempunyai hubungan positif dengan peningkatan efisiensi. Faktor-faktor seperti pergantian pimpinan yang teratur, berkurangnya biaya tenaga kerja, dan pengendalian lingkungan semua ini dapat dianggap sebagai beberapa aspek yang mengatur pelaksanaan pekerjaan secara tertib dan efisien (Steers, 1985: 80).

Pengaruh ukuran unit kerja terhadap sikap dan tingkah laku para pekerja dan pengaruhnya terhadap organisasi tampak berlainan dengan ukuran organisasi. Bagi para pekerja semakin besarnya ukuran unit kerja selalu dihubungkan dengan berkurangnya kepuasan kerja, tingkat kehadiran, merosotnya tingkat kebetahan, dan meningkatkan perselisihan perburuhan (Steers, 1985: 80).

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang dipergunakan untuk mengukur struktur birokrasi adalah:

- a. Pembentukan Struktur Organisasi
- b. Pembagian Tugas.
- c. Koordinasi dari para pelaksana kebijakan.

#### **D. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**

##### **1. Kebijakan dan Strategi Nasional tentang SPAM**

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan peraturan lainnya serta skenario pengembangan

SPAM, sasaran dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) melalui perpipaan dan non-perpipaan terlindungi, antara lain sebagai berikut:

- a. Tewujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem perpipaan yang semula 18% pada tahun 2004 menjadi 32% pada tahun 2009 dan selanjutnya meningkat menjadi 60% pada tahun 2015.
- b. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat kehilangan air direncanakan hingga pada angka 20% dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam dunia usaha.
- c. Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem non-perpipaan terlindungi pada tahun 2004 sebesar 37,47% menjadi 33% pada tahun 2009 dan 20% pada tahun 2015, sehingga persentase penggunaan SPAM melalui sistem non-perpipaan tidak terlindungi semakin menurun dari tahun ke tahun.
- d. Pembiayaan pengembangan SPAM meliputi pembiayaan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem non fisik SPAM. Pemerintah dapat memberikan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar 60 L yang di butuhkan secara bertahap, bantuan pemerintah diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin, dan
- e. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan.

## 2. Pengertian SPAM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pasal 1 menyebutkan pengertian :

- a. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum
- b. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- c. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

- d. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
- e. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
- f. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.

### 3. Pengelolaan SPAM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bab V menyebutkan pengertian:

- a. Pengelolaan SPAM dilaksanakan apabila prasarana dan sarana SPAM yang telah terbangun siap untuk dioperasikan dengan membentuk organisasi penyelenggara SPAM.
- b. Pengelolaan SPAM meliputi:
  - 1) Kegiatan pengoperasian dan pemanfaatan dan
  - 2) Kegiatan administrasi dan kelembagaan.

### 4. Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPAM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bab VI menyebutkan pengertian:

- a. Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM adalah tanggung jawab penyelenggara.
- b. Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM dilaksanakan setelah prasarana dan sarana air minum siap beroperasi, dan
- c. Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM meliputi pemeliharaan terhadap unit air baku, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

### 5. DAK Infrastruktur Subbidang Air Minum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/M/2007 tentang Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. Prioritas nasional sub bidang air minum dan sanitasi memberi akses pelayanan sistem penyediaan air minum (SPAM) kepada masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan termasuk daerah pesisir dan permukiman nelayan. Kriteria teknis untuk prasarana air minum dengan mempertimbangkan: 1) Desa dan kelurahan rawan air minum, 2) Jumlah penduduk desa/kelurahan berpenghasilan rendah (20% dari total penduduk ), 3) Luas kawasan kumuh perkotaan (2 Ha), 4) Kinerja pelaporan DAK subbidang air minum Kabupaten/Kota, dan 5) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).

Cakupan kegiatan diutamakan untuk kegiatan optimalisasi dan pembangunan baru sistem penyediaan air minum bagi masyarakat yang rawan air minum dan kekeringan. Skala pelayanan SPAM minimal skala komunal (namun bukan individu) dan daerah pelayanan berada diluar jaringan (sistem) PDAM. Teknologi unit SPAM diutamakan menggunakan teknologi sederhana sehingga mampu digunakan oleh masyarakat. Khusus untuk kawasan di lokasi tersebut memungkinkan dilayani PDAM maka pengembangan air minum sederhana tersebut harus menggunakan sumber pipa dari PDAM jika masih ada sisa kapasitas yang didukung pernyataan dari pihak PDAM.

a. Perencanaan dan Pemograman:

1. Penyusunan daftar fasilitas SPAM:

- a) Identifikasi jenis SPAM berdasarkan sumber air baku: 1) Mata air seperti Perlindungan Mata Air (PMA), 2) Air tanah, 3) Air

permukaan, paket instalasi pengolahan air (IPA), pompa hidran, saringan pipa resapan, dan 4) Air hujan.

- b) Identifikasi berupa kelengkapan SPAM: 1) Unit distribusi perpipaan, 2) Perpompaan untuk sistem dengan topografi dimana wilayah pelayanan lebih tinggi dari unit produksi, dan 3) Hidran umum dan sambungan rumah murah.

2. Penyusunan usulan program prioritas.

Identifikasi daerah yang belum memiliki fasilitas SPAM dengan membuat program pembangunan fasilitas SPAM baru dengan kriterianya daerah rawan air, daerah rawan penyakit, rawan sanitasi, daerah miskin, aksesibilitas, daerah terpencil, dan jarak dengan sumber air.

3. Penentuan Program.

Penentuan program (pembangunan baru) didasarkan pada pertimbangan bahwa teknologi yang diterapkan harus sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang ada di lokasi.

- b. Perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi

Penentuan kebutuhan air pada suatu wilayah pelayanan ditentukan oleh dua parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Pemeriksaan kualitas baku harus mengacu pada Kepmenkes RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002 menyebutkan bahwa kualitas air ditinjau dengan parameter bau, rasa, kekeruhan dan warna. Metode pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan swakelola dan kontraktual dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Pengelolaan

### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat/orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan sendiri yang dikemukakan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal, ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda beda. Ada yang meninjau dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Mendefinisikan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Wardoyo, 1980: 41). Sedangkan menurut Harsoyo (1977: 121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

### 2. Konsep Pengelolaan Air Bersih

Konsep pengelolaan air bersih dan sumber air bersih itu pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa menyalurkan air yang tersedia dalam konteks ruang, waktu, jumlah dan mutu pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat (Kodoatie, 2002: 215).

Karena semakin tinggi tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkualitas baik, maka kegiatan pengelolaan air bersih semakin diperlukan. Hal ini akan memunculkan konflik kepentingan antara masyarakat sebagai pengguna, hingga perlu dilakukan dengan kegiatan pengelolaan. Agar kedepan penyediaan air bersih lebih adil dan berkelanjutan.

Subsistem yang diperlukan dalam sistem penyediaan air bersih dapat dijabarkan sebagai berikut Simatupang (1995: 36):

- a. Subsistem organisasi dan manajemen, meliputi aspek bentuk organisasi, struktur organisasi, personalia (kualitas dan kuantitas), tata laksana kerja dan pendidikan serta latihan.
- b. Subsistem teknik operasional, meliputi aspek tingkat penyediaan, lingkup wilayah yang terlayani, pos-pos penampungan air, pengaliran air beserta prasarana pendukungnya.
- c. Subsistem pembiayaan dan retribusi/iuran, meliputi aspek sumber pendanaan, struktur pembiayaan, pola dan prosedur penarikan iuran dan struktur penentuan tarif iuran.
- d. Subsistem pengaturan, meliputi aspek pembentukan aturan-aturan sebagai mekanisme kontrol terhadap sistem.

### 3. Manajemen dalam Pengelolaan Air Bersih

Dalam kegiatan layanan air bersih, perlu memperhatikan prinsip-prinsip manajemen, karena dalam menjalankan organisasi dibutuhkan manajemen. Manajemen/pengelolaan sumber daya air di definisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam

dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan (Grigg dalam Sumiyarsono, 2010: 48). Jika mengacu pada teori manajemen, maka dalam proses pengelolaan terdapat berbagai rangkaian kegiatan yang perlu diperhatikan, meliputi:

- a. *Goal setting*
- b. *Planning*
- c. *Staffing*
- d. *Directing*
- e. *Supervising*
- f. *Controlling*

Keenam tahapan tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan layanan air berbasis masyarakat. Tetapi pada prakteknya, tahapan itu dapat dipandang sebagai proses yang dinamis, mengingat karakteristik masyarakat sebagai subjek dan objek dipengaruhi oleh lingkungan.

Dalam memanfaatkan air bersih, perlu disertai dengan pelestarian/konservasi, agar pemanfaatannya bisa berlanjut. Konservasi dalam hal ini tidak hanya diartikan kegiatan menyimpan air saja atau disebut sebagai konservasi dari segi suplai, tapi lebih mengarah kepada pengurangan atau pengefisienan penggunaan air yang sering disebut sebagai konservasi dari segi kebutuhan. Konservasi air yang baik merupakan gabungan dari kedua konsep tersebut, yaitu menyimpan air dikala berlebihan, dan dikala kekurangan menggunakannya sesedikit mungkin untuk keperluan tertentu yang produktif. Sehingga konservasi air domestik berarti menggunakan air sesedikit mungkin untuk mandi, mencuci, menggelontor toilet dan penggunaan-penggunaan rumah tangga lainnya (Suripin, 2002: 133).

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan melakukan klarifikasi suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan memakai metode-metode penelitian yang sangat menentukan tingkat hasil penelitiannya. Suatu penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti, agar memperoleh data yang dikehendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan sarana air bersih di Kecamatan Slahung. Untuk itulah, peneliti memakai jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan fenomena yang diselidiki.

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat diperlukan dalam hal ini karena untuk membatasi pembahasan agar sesuai dengan permasalahan dan tidak meluas ke hal-hal yang diluar permasalahan. Menurut Moleong (2004 : 62) penetapan fokus memiliki 2 (dua) maksud yaitu:

1. Penetapan fokus dan membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang itu sendiri.
2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau masukan pengeluaran (*inclusia exclusia criteria*), suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus seorang

peneliti akan tahu proses data mana yang perlu dikumpulkan dan perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang dikumpulkan. Jadi dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat dengan mudah membuat keputusan tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah atau mana yang akan dibuang.

Sebagai fokus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan, dengan fenomena yang diamati adalah:
  - a. Proses Implementasi Kebijakan, meliputi:
    - 1) Penyusunan Daftar Kegiatan.
    - 2) Penyelesaian Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih.
    - 3) Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih.
  - b. Pencapaian Tujuan Kebijakan, meliputi:
    - 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
    - 2) Kemampuan lembaga HIPPAM desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
    - 3) Partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.
  - a. Komunikasi, adapun fenomena yang diamati adalah:
    - 1) Intensitas Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih.
    - 2) Kejelasan komunikasi kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih dari para pelaksana.
    - 3) Konsistensi perintah-perintah kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih.

- b. Sumber daya, adapun fenomena yang diamati adalah:
  - 1) Kemampuan Sumber daya manusia
  - 2) Pendukung kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih.
- c. Sikap, adapun fenomena yang diamati adalah:
  - 1) Persepsi Pelaksana.
  - 2) Respon Pelaksana.
  - 3) Tindakan Pelaksana.
- d. Struktur birokrasi, adapun fenomena yang diamati adalah:
  - 1) Pembentukan Struktur Organisasi, yaitu berkaitan dengan pengelompokan kerja dari masing-masing pelaksana Pengendalian Sarana Air Bersih.
  - 2) Pembagian tugas.
  - 3) Koordinasi dari para pelaksana Pengendalian Sarana Air Bersih.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Ponorogo, sedangkan situs penelitian adalah desa-desa Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang mendapatkan bantuan pembangunan sarana air bersih.

Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan desa di Kecamatan Slahung masih mengalami kelangkaan air khususnya pada musim kemarau.

### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data adalah orang atau benda yang dipilih sebagai nara sumber untuk memperoleh data yang diperlukan. Pemilihan tersebut berdasarkan anggapan bahwa mereka adalah pihak yang menguasai bidang permasalahan dalam

penelitian ini. Sedangkan menurut Lofland (dalam Moleong, 2000:12) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, arsip dan lain-lain. Untuk itu dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan atau pada saat penelitian peneliti mengambil data orang-orang yang paling mengetahui permasalahan yang ada sesuai dengan fokus penelitian yaitu:

- a. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum
- b. Camat Kecamatan Slahung
- c. Aparat Desa di Kecamatan Slahung
- d. Para pelaku pengelola air bersih

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan penelitian. Data itu diperoleh peneliti dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya yang berupa dokumen, arsip, laporan, catatan dan lain-lain yang berhubungan penelitian.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangatlah penting karena berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil adalah benar. Oleh karena itu penelitian metode pengumpulan data harus dilakukan dengan tepat. Metode yang digunakan menggunakan metode skala, yaitu suatu metode pengambilan data di mana data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh

melalui pernyataan atau pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden mengenai suatu hal yang disajikan dalam bentuk suatu daftar pertanyaan (Sugiyono, 1994: 173). Pada umumnya data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan penelitian ini adalah:

1. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu *pewawancara (interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara (interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2008:186).

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko dan Achmadi, 2003:70).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian, atau data dari individu sebagai objek penelitian (Efferin, Darmaji dan Tan, 2004:101).

## **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat bantu utama. Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan

dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana/benda Arikunto (2002:126). Instrumen yang digunakan yakni:

1. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisa data.
2. Pedoman wawancara, merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan.
3. Perangkat penunjang lain yang merupakan buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh dilokasi penelitian.

### G. Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitiannya, dalam penelitian kualitatif standar tersebut disebut keabsahan data. Menurut Moleong (1990 :17) dalam menetapkan keabsahan data dapat dilihat sebagai berikut :

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Beberapa cara yang ditempuh agar kebenaran hasil penelitian ini dapat dipercaya, yaitu :

- a. Pengamatan terus-menerus
  - b. Triagulasi
  - c. Peneliti akan memebicarakannya dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan tentang pokok penelitian dan juga tentang metode penelitian naturalistic atau kualitatif.
2. Keteralihan (*tranferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada persamaan antar konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut peneliti akan mencari data dan mengumpulkannya dalam konteks yang berhubungan

dengan Pelaksanaan asas diskresi aparat birokrasi dalam peningkatan pelayanan kepada publik.

3. Kebergantungan (*dependency*) dan kepastian (*confirmability*)

Kebergantungan menurut istilah konvensional disebut dengan reliabilitas. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas, hanya dengan alat yang *reliable* maka akan dapat diperoleh data yang valid.

## H. Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisa data dapat diberi arti, makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri. Moleong (1994:103) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Maka dari itu sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memperoleh gambaran dan interpretasi yang menyeluruh tentang fenomena sosial yang dikaji, diperlukan proses interpretasi atas data yang ada.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta

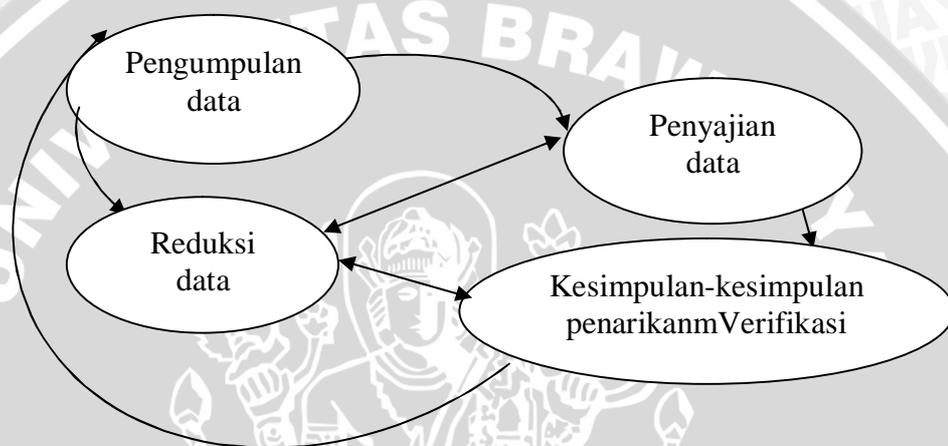
menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992:19) diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, yaitu:

1. Reduksi data  
Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.
2. Penyajian data  
Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi  
Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasan-penjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam alur skema berikut:

Gambar 4

Komponen-komponen Analisa Data: Model Interaktif



(Miles dan M Huberman (1992: 19))

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Penelitian

##### 1. Keadaan Umum Wilayah Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo dengan luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> terbagi dalam 21 kecamatan, 279 desa, 26 kelurahan, 2.272 RW dan 6.842 RT. Penduduk Ponorogo menurut registrasi tahun 2010 sebanyak 899.328 jiwa. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan sebanyak 305.771 jiwa (34 %), sedangkan sisanya 593.557 jiwa (66 %) bertempat tinggal di pedesaan.

Adapun batas wilayah Kabupaten Ponorogo pada sebelah utara berbatasan dengan Kab. Magetan, Kab. Madiun sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan, untuk sebelah timur dengan Kabupaten Trenggalek, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Untuk lebih jelas bisa dilihat ditabel:

**Tabel 3**

**Batas Wilayah Kabupaten Ponorogo**

No	Letak	Kota
1	Sebelah Utara	Kab. Magetan, Kab. Madiun
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Pacitan
3	Sebelah Timur	Kabupaten Trenggalek
4	Sebelah Barat	Kabupaten Wonogiri

**Gambar 5**

Wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada Gambar 3:



*(Wilayah Administrasi Kabupaten Ponorogo)*

1) Topografi

Ketinggian Kabupaten Ponorogo dari permukaan laut adalah 92-2.563 meter

2) Klimatologi

Suhu udara berkisar  $18^{\circ}$  –  $31^{\circ}$  Celcius, seperti umumnya daerah-daerah di Indonesia Kabupaten Ponorogo mengalami musim hujan bulan Oktober-April, dengan curah hujan sebesar 145,916 meter pertahun.

### 3) Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Ponorogo sebuah Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 891.302 jiwa.

### 4) Wilayah Administrasi

Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo terdiri atas:

- a. 21 ( dua puluh satu ) Kecamatan
- b. 26 ( dua puluh enam ) Kelurahan
- c. 229 ( dua ratus dua puluh sembilan ) desa

Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Slahung, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan.

Kabupaten Ponorogo mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau. Masyarakat di Kabupaten Ponorogo adalah masyarakat agraris, di mana mata pencaharian pokoknya adalah bertani sawah dan kebun, di samping ada juga yang menjadi pedagang, peternak, guru, dan pegawai lainnya. Hal ini terlihat dari luasnya lahan yang digunakan untuk persawahan dan pertanian. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas pertanian sebanyak 35.000 (ha) untuk lahan persawahan, sedangkan sisanya 102.178 (ha) adalah lahan pertanian dan pembangunan (rumah, kantor, gedung dan lain sebagainya).

## 2. Gambaran Umum Kecamatan Slahung

Kecamatan Slahung adalah salah satu Kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di wilayah administratif Kabupaten Ponorogo. Wilayah kecamatan Slahung terletak pada ketinggian antara 103 meter sampai dengan 578 meter dipermukaan laut. Batas Fisik Kecamatan Slahung adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Balong  
 Sebelah Timur : Kecamatan Bungkal  
 Sebelah Selatan : Kecamatan Ngrayun  
 Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan

Berdasarkan hasil Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) dalam rangka pelaksanaan Sensus Pertanian 1993 tercatat luas kecamatan sebesar 90,34 Km<sup>2</sup>.

Wilayah kecamatan Slahung terdiri dari 22 Kelurahan:

**Tabel 4**

22 Kelurahan Kecamatan Slahung			
1	Tugurejo	12	Plancungan
2	Senepo	13	Jebeng
3	Slahung	14	Galak
4	Caluk	15	Truneng
5	Broto	16	Simo
6	Menggare	17	Crabak
7	Kambeng	18	Mojopitu
8	Wates	19	Gundik
9	Ngilo-ilo	20	Nailan
10	Duri	21	Gombang
11	Ngloning	22	Janti

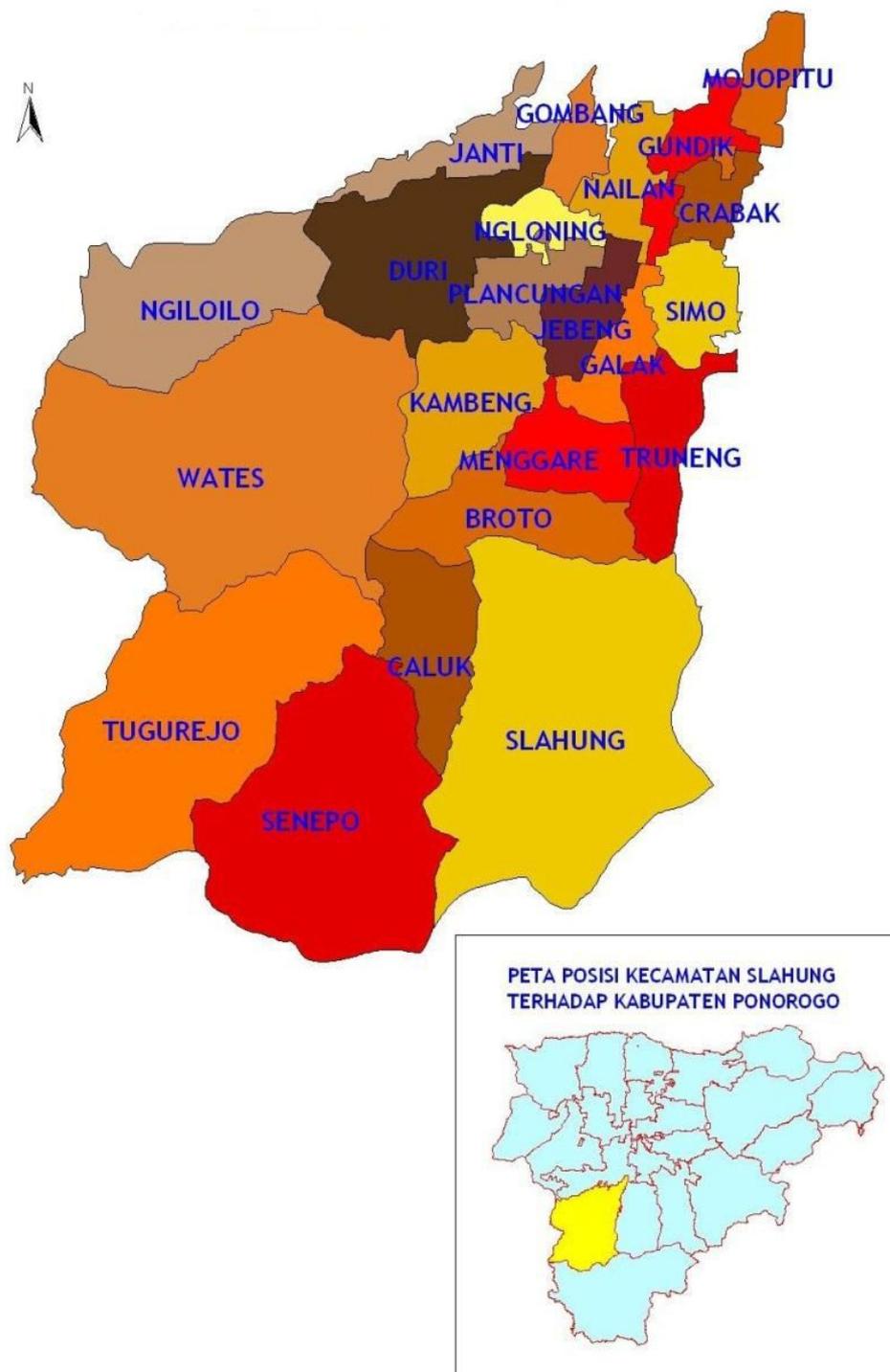
(Sumber: Profil Kecamatan Slahung 2010)

Dan dibagi menjadi:

- 1) 154 Rukun Warga ( R.W. )
- 2) 417 Rukun Tetangga ( R.T. )
- 3) 68 Lingkungan / Dusun

Gambar 6

PETA WILAYAH KECAMATAN SLAHUNG



(Sumber: Profil Kecamatan Slahung 2010)

### 3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo

#### a. Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan energi dan sumber daya mineral yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

#### a. Kepala Dinas

#### b. Sekretariat Daerah yang membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

#### c. Bidang Sumber Daya Air membawahi :

1. Seksi Bina Teknik Sumber Daya Air
2. Seksi Irigasi
3. Seksi Bina Pengelolaan Sumber Daya Air

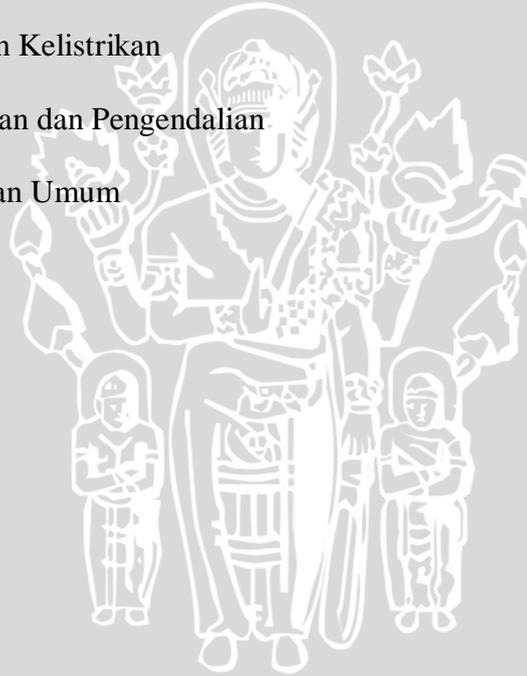
#### d. Bidang Bina Marga membawahi :

1. Seksi Bina Teknis Jalan dan Jembatan
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
3. Seksi Peralatan Jalan

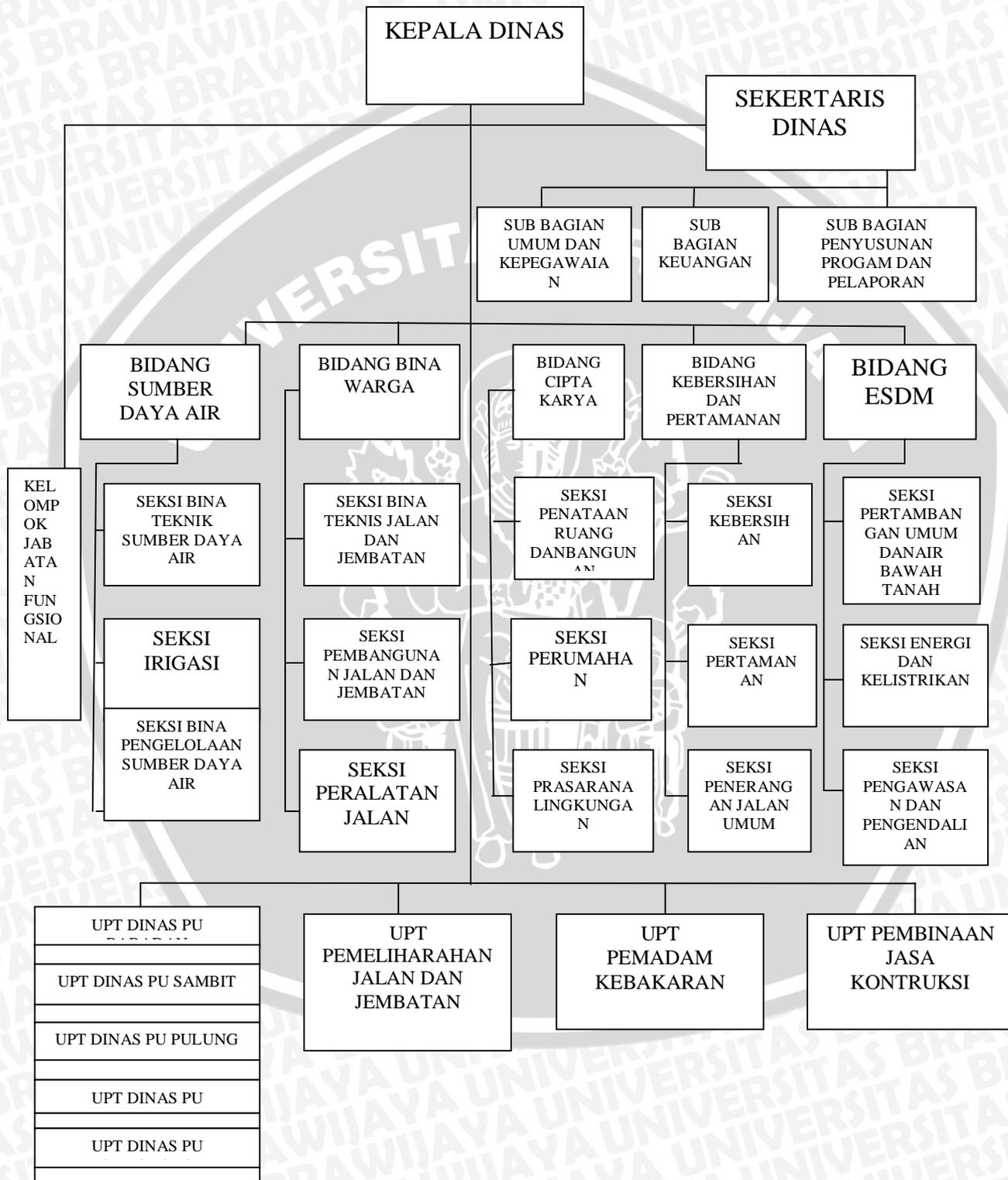
#### e. Bidang Cipta Karya membawahi :

1. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan

2. Seksi Perumahan
  3. Seksi Prasarana Lingkungan
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan membawahi :
1. Seksi Kebersihan
  2. Seksi Pertamanan
  3. Seksi Penerangan Jalan Umum
- g. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah
  2. Seksi Energi dan Kelistrikan
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- h. UPT Dinas Pekerjaan Umum



**Gambar 7**  
**Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum**  
**Kabupaten Ponorogo**



b. Visi dan Misi

1. VISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*. Pernyataan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo adalah

**Terwujudnya Infrastruktur Permukiman Dan Prasarana Wilayah Serta Pengelolaan Energi Dan Sumberdaya Mineral Yang Memadai, Bermanfaat Dan Berkelanjutan (*Sustainable*)**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Dinas dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan peran dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) Terwujudnya terkandung upaya dan peran dinas dalam menyediakan Infrastruktur Permukiman dan Prasarana Wilayah Serta Pengelolaan Energi Dan Sumberdaya Mineral Yang Memadai, Bermanfaat Dan Berkelanjutan.
- 2) Infrastruktur Permukiman adalah segenap kebutuhan dasar suatu lingkungan bagi terwujudnya lingkungan tempat tinggal/lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

- 3) Prasarana Wilayah adalah kelengkapan dasar fisik wilayah yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- 4) Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah suatu proses mulai dari pendataan potensi, eksploitasi dan eksplorasi energi dan sumber daya mineral yang ada di wilayah kabupaten.
- 5) Memadai adalah terpenuhinya kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 6) Bermanfaat adalah berfungsinya seluruh sumberdaya yang ada sesuai dengan yang seharusnya.
- 7) Berkelanjutan adalah tersedianya prasarana wilayah dan pengelolaan ESDM.

## 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo adalah mewujudkan infrastruktur permukiman dan prasarana wilayah serta Melaksanakan pengelolaan urusan Energi dan sumber daya mineral yang memadai dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan kemampuan SDM yang handal.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (*goal*) yang akan dicapai.

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan Misi “Mewujudkan infrastruktur permukiman dan prasarana wilayah serta Melaksanakan pengelolaan urusan Energi dan sumber daya air yang memadai dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan kemampuan SDM yang handal “, sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran meningkatnya sarana dan prasarana air bersih ditetapkan kebijakan:
  - a. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan lembaga HIPDAM dalam mengatasi dan mengelola ketersediaan air bersih di wilayahnya, melalui sosialisasi, koordinasi, komunikasi antar masyarakat dan dinas instansi terkait.
  - b. Mendorong optimalisasi pelayanan PDAM ke daerah-daerah pedesaan yang rawan terhadap air bersih melalui stimulan bantuan pembangunan sarana dan prasarana air bersih.
2. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Sanitasi Lingkungan ditetapkan kebijakan mendorong penyelenggaraan pembangunan lingkungan permukiman yang partisipatif dengan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat melalui pembinaan, fasilitasi dan stimulasi.

Program pembangunan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Program Pengembangan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa.

## **B. Gambaran Umum Kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat**

Bantuan Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat yang selanjutnya disebut HIPPAM adalah sarana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Masyarakat Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan air bersih masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum pada sektor air bersih di pedesaan dimaksudkan untuk membantu masyarakat pedesaan agar mempunyai akses terhadap air bersih yang aman dan layak, khususnya masyarakat miskin. Prasarana air bersih yang sudah dibangun oleh pemerintah, selanjutnya akan diserahkan kepada masyarakat desa setempat yang telah membentuk Himpunan Penduduk Pemakai Air Bersih (HIPPAM) untuk mengelolanya.

Tujuan diberikannya Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga HIPPAM di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.

- c. Meningkatkan pemerataan pengadaan air bersih bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Biaya Operasional dikumpulkan dari Iuran warga yang menggunakan sarana air bersih, diantaranya dipergunakan untuk:

- a. Biaya Operasional HIPPAM, meliputi:
  - 1) Insentif Penanggung Jawab Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan HIPPAM, dan Bendahara/Pemegang Kas Kegiatan HIPPAM.
  - 2) Pengadaan Belanja Barang dan Jasa keperluan HIPPAM.
- b. Biaya Operasional HIPPAM, yang besarnya ditentukan berdasarkan bentuk sarana dan prasarana yang sudah terbangun di masing-masing desa, digunakan untuk:
  - 1) Perbaikan Pipa-pipa distribusi.
  - 2) Biaya Rapat.

Proses Kebijakan pembangunan sarana air bersih masyarakat yaitu:

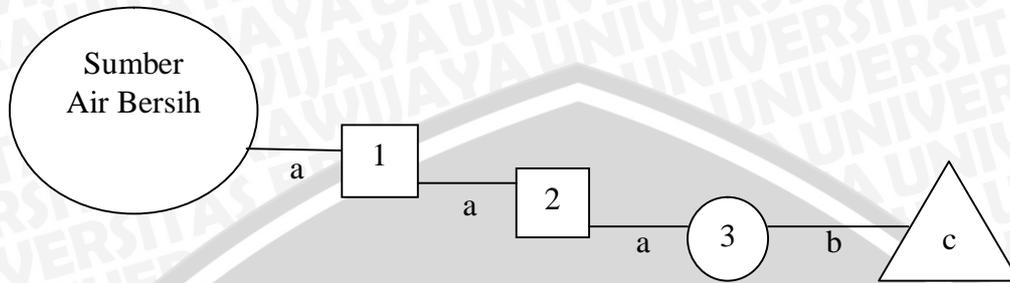
- a. Kepala Desa mengusulkan program dan merencanakan bersama Pemerintah Daerah dimana lokasi mata air dan jalur terdekat dan paling memungkinkan untuk dilalui pipa yaitu pada saat Musrenbang.
- b. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu kontraktor, pada tahap ini pelibatan masyarakat setempat sebagai pekerja kasar dan jumlahnya relatif sedikit, itupun biasanya atas inisiatif dari masyarakat meminta kepada kontraktor untuk

dijadikan tenaga kerja agar dikemudian untuk keberlanjutan pembangunan masyarakat menjadi tahu untuk pengelolaannya.

- c. Tahap terakhir adalah tahap pemanfaatan yakni tahap untuk masyarakat memanfaatkan hasil-hasil dari program pembangunan yang telah berhasil dilaksanakan. Tahap pemanfaatan hasil pembangunan ini akan menuntut perwujudan partisipasi masyarakat secara utuh yaitu untuk mengelola prasarana sesuai keinginan masyarakat agar tetap berkelanjutan. Oleh sebab itu, pada tahap pemanfaatan prasarana yang telah dibangun ini diharapkan diikuti oleh tumbuhnya tanggung jawab dari diri masing-masing anggota masyarakat untuk memelihara dan menjaga agar proyek-proyek yang telah berhasil dibangun, manfaatnya tetap dapat dinikmati secara optimal dan berkelanjutan.
- d. Salah satu persyaratan sebelum prasarana yang berhasil dibangun bisa diserahkan dari Pemda kepada masyarakat adalah terbentuknya HIPPAM yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat melalui musyawarah desa, HIPPAM mempunyai tugas dan tanggungjawab operasional, pemeliharaan dan perbaikan prasarana air bersih.

Dalam memanfaatkan sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum memberikan sistem pelayanan air bersih untuk masyarakat desa pada umumnya sebagai berikut:

**Gambar 8**  
**Sistem Pelayanan Air Bersih**



(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 2007)

Keterangan:

(a): Jaringan Tranmisi

(b): Jaringan Distribusi

(c): Pelanggan

1 : Intake

2 : IPA (Instalasi Pengolahan Air)

3 : Reservoir

Dari gambar di atas dapat di jelaskan Sistem Pelayanan Air Bersih, sebagai berikut:

1. Sistem Pengolahan Air Baku (*intake*)

Sistem ini juga disebut dengan Instalasi Pengelohan Air (IPA) merupakan instalasi pengolahan, dari air baku menjadi air yang siap untuk didistribusikan kepada pihak konsumen air bersih.

2. Sistem Jaringan Transmisi.

Merupakan suatu sistem transportasi air baku ke sistem pengolahan air baku ketempat penampungan (*reservoir*). Cara pengangkutannya bisa dengan cara gravitasi atau dengan pemompaan.

### 3. Sistem Jaringan Distribusi.

Adalah sistem penyaluran air bersih dari reservoir sampai kedaerah-daerah pelayanan.

Dalam sistem distribusi air bersih, ada beberapa hal yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Air harus sampai pada masyarakat pengguna dengan kualitas baik tanpa ada kontaminasi.
2. Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setiap saat dan dalam jumlah yang cukup.
3. Sistem dirancang sedemikian rupa sehingga kebocoran pada sistem distribusi dapat dihindari, hal ini penting karena menyangkut efektifitas (*service user*) pelayanan dan efisiensi pengelolaan (*service provider*).
4. Tekanan air dapat menjangkau daerah pelayanan, walaupun dengan kondisi air bersih yang cukup kritis.

Menurut hirarkinya, pipa□pipa yang digunakan dalam distribusi adalah:

#### 1. Pipa Induk

Pipa ini merupakan pipa distribusi pada jaringan terluar yang menghubungkan blok-blok pelayanan. Pipa ini tidak bisa digunakan untuk melayani kapling rumah. Pipa yang digunakan disini adalah pipa yang mempunyai ketahanan tinggi.

## 2. Pipa Cabang

Pipa cabang di pakai untuk menyadap air langsung dari pipa induk dialirkan kesuatu blok pelayanan. Jenis pipa ini sebaiknya sama dengan pipa induk.

## 3. Pipa Service

Pipa ini melayani sambungan langsung dengan rumah.

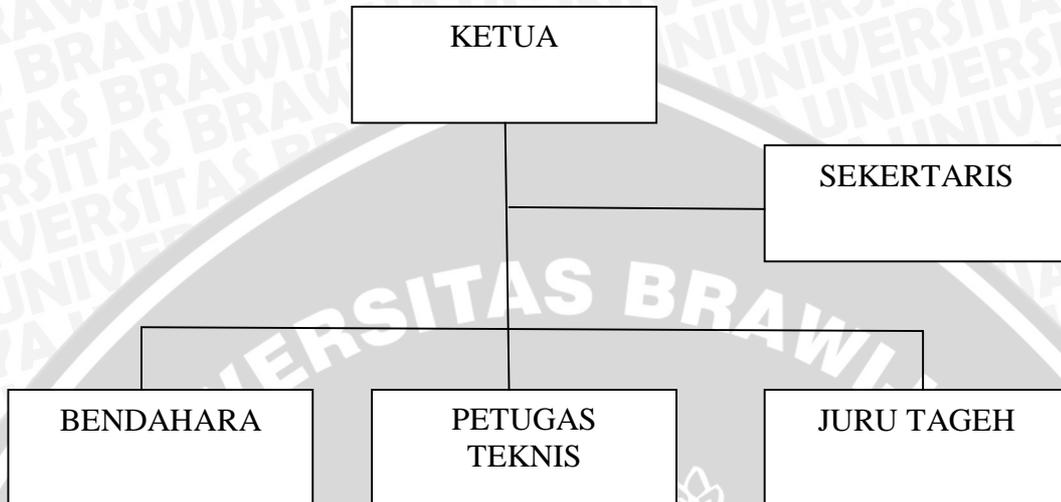
Tujuan dikelolanya air bersih dalam lembaga HIPPAM ini adalah:

1. Menimbulkan rasa ikut memiliki sarana yang telah dibangun didaerahnya dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat secara gotong-royong bermusyawarah untuk bersama-sama membuat progam pemeliharaan serta segala kegiatan dalam rangka melestarikan sarana yang ada.
2. Meningkatkan pengertian serta kemampuan masyarakat untuk dapat menghayati bahwa air bersih ini adalah kebutuhan pokok yang tidak begitu saja mendapatkannya.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melayani dan mencukupi kebutuhan air bersih untuk mereka sendiri dengan menggunakan sistem yang sesuai dengan kondisi setempat.
4. Diharapkan dapat mempermudah proses terbentuknya “Masyarakat Air Minum *Minded*”

Selanjutnya Intruksi Gubernur ini ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo untuk mengangkat kepengurusan HIPPAM, melaksanakan tugas pembinaan dan penyuluhan terhadap lembaga HIPPAM. Sturktur organisasi HIPPAM sendiri seperti terlihat dibawah ini:

Gambar 9

## STRUKTUR ORGANISASI HIPAM



(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 2007)

### C. Penyajian Data

Secara umum pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat di Kecamatan Slahung masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

#### 1. Proses Implementasi Kebijakan

##### a. Penyusunan Daftar Kegiatan.

Hasil wawancara dengan Camat Slahung Drs. Bambang Nurcahyo, M.Si terhadap penyusunan daftar kegiatan pembangunan sarana air bersih masyarakat sebagai berikut :

“Bagi Desa-desanya di Kecamatan Slahung, penyusunan rencana kegiatan pembangunan sarana air bersih masyarakat telah berjalan dengan baik terbukti dari terselenggaranya Musrenbang, hal ini dikarenakan Musrenbang

menjadi syarat mengajukan pembangunan sarana air bersih” (wawancara tanggal 13 Maret 2013)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Wates Bapak Nanta Budi Harianto yang menyatakan :

“Di desa kami sudah tersusun rencana pembangunan sarana air bersih dengan mengikuti Musrenbang”(wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Demikian juga Seksi Pembangunan Kecamatan Slahung Bapak Abdul Juri membenarkan pernyataan di atas karena berdasarkan wawancara dengan peneliti menyampaikan :

“Memang benar semua desa yang membutuhkan pembangunan sarana air bersih telah mengikuti Musrenbang, yang menjadi syarat pembangunan sarana air bersih untuk tahap pertama selain harus memenuhi syarat lainnya” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa beberapa desa yang berada di Kecamatan Slahung telah menyusun daftar kegiatan pembangunan sarana air bersih melalui Musrenbang. Hal ini diperkuat dengan tabel daftar pembangunan sarana air bersih, melalui Musrenbang di desa-desa Kecamatan slahung:

**Tabel 5**

**Rencana Pembangunan Sarana Air Bersih**

**Kecamatan Slahung**

No	Progam/Kegiatan	Sasaran	Lokasi
1	Pembangunan Sarana Air Bersih	Meningkatkan SDM (Sumber Daya Mineral)	Snepo
2	Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih	Memenuhi Kebutuhan air bersih masyarakat	Slahung
3	Pembangunan Sarana Air Bersih	Untuk menghindari kelangkaan air bersih	Ngilo-ilo
4	Sistem Pembangunan Air Bersih	Terpenuhi Kebutuhan Air Bersih	Wates

5	Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih	Memenuhi Kebutuhan air bersih masyarakat	Caluk
---	--	--	-------

(Sumber Data: Hasil Analisa 2013)

b. Penyelesaian Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih

Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan pembanguna sarana air bersih, para informan memberikan pernyataan yang senada yaitu bahwa semua kegiatan pembanguna sarana air bersih telah diselesaikan semuanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Slahung Drs. Bambang Nurcahyo, M.Si sebagai berikut:

“Menurut pengamatan kami semua kegiatan pembangunan sarana air bersih di wilayah Kecamatan Slahung telah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun seringkali terlambat”(wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Sedangkan Seksi Pembangunan Kecamatan Slahung Bapak Abdul Juri juga memberikan pernyataan yang mendukung Camat Slahung sebagai berikut pernyataannya:

”Pelaksanaan pembangunan sarana air bersih di beberapa desa yang mengikuti musrenbang wilayah Kecamatan Slahung telah seratus persen selesai” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Demikian juga Kepala Desa Slahung Ibu Anik Setiowati memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

“Sudah semua mas, dan bisa dicek ke lapangan untuk membuktikan bahwa semua kegiatan pembangunan sarana air bersih yang sudah tertera dalam Musrenbang itu sudah dilaksanakan oleh kontraktor semuanya”(wawancara tanggal 30 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa terdapat penyelesaian kegiatan pembangunan sarana air bersih yang sudah direncanakan dalam Musrenbang. Berikut tabel pembangunan sarana air bersih yang ada di beberapa desa Kecamatan Slahung:

Tabel 6

## Ketersediaan Air Bersih Di Kecamatan Slahung

No	Desa	Jenis Sumber
1	Snepo	1 mata air/sumber
2	Slahung	3 mata air/sumber
3	Ngilo-ilo	1 mata air/sumber
4	Wates	2 mata air/sumber
5	Caluk	1 mata air/sumber

(Sumber Data: Hasil Analisa 2013)

c. Pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih.

Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana air bersih terdapat kesamaan dari para informan, antara lain disampaikan oleh Camat Slahung Bambang Nurcahyo, M.Si, sebagaimana pernyataan berikut:

“Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana air bersih dalam bentuk Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) telah dibuat oleh tiap-tiap desa yang mendapat bantuan sarana air bersih, sebagai syarat serah terima sarana pembangunan” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Sedangkan Seksi Pembangunan Kecamatan Slahung Bapak Abdul Juri juga mendukung pernyataan Camat Slahung, sebagai berikut:

“Penyerahan sarana air bersih kepada masyarakat harus dengan membentuk lembaga untuk mengelola demi keberlanjutan dengan membentuk HIPPAM, sehingga semua desa yang mendapat bantuan sarana air bersih harus membentuk HIPPAM sebagai konsekuensi serah terima sarana air bersih” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Kepala Desa Slahung Ibu Anik Setiowati saat ditemui oleh peneliti juga memberikan pernyataan yang senada dengan Camat dan Kasi Pembangunan Kecamatan Slahung, yaitu :

“Pasti mas kami buat HIPPAM karena dipakai sebagai persyaratan untuk penyerahan sarana air bersih” (wawancara tanggal 30 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa terdapat pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana air bersih, melalui Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Berikut data perihal penyusunan HIPPAM di desa-desa yang mendapat pembangunan sarana air bersih Kecamatan Slahung:

**Tabel 7**  
**HIPPAM Kecamatan Slahung**

No.	Desa Kecamatan Slahung	HIPPAM
1	Snepo	Snepo
2	Slahung	Surya Mas
3	Ngilo-ilo	Ngilo
4	Wates	Wates
5	Caluk	Al-Huda

(Sumber Data: Hasil Analisa 2013)

## 2. Pencapaian Tujuan Kebijakan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian sarana air bersih, adalah :

- Meningkatkan penyelenggaraan pemeritahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- Meningkatkan kemampuan lembaga HIPPAM di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- Meningkatkan pemerataan pengadaan air bersih bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan pemberian sarana air bersih di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga HIPPAM di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan antara atau tujuan tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pengadaan air bersih bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penelitian terhadap pencapaian tujuan kebijakan, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga HIPPAM desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terdapat beberapa pernyataan yang senada antara informan satu dengan yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Slahung Drs. Bambang Nurcahyo, M.Si dapat diperoleh informasi bahwa pembangunan sarana air bersih telah membantu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berikut penuturannya:

“Kondisi desa-desa di Kecamatan Slahung yang tergolong desa yang langka akan air bersih dan pengadaan air bersih sangat terbantu dengan adanya Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat sehingga dibandingkan sebelum adanya Pembangunan terdapat peningkatan di bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Demikian juga Kepala Desa Slahung Anik Setiowati memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

“Desa Slahung bisa memenuhi kebutuhan air bersih yang bisa langsung dinikmati masyarakat langsung sampai dirumah-rumah penduduk, tanpa harus mengambil dari Hidran Umum (HU)” (wawancara tanggal 30 Maret 2013).

Hal senada juga disampaikan oleh informan Seksi Pembangunan Kecamatan Slahung Bapak Abdul Juri dan sebagai berikut:

“Sekarang ini desa-desa di wilayah Kecamatan Slahung dapat sedikit bernafas lega karena kebutuhan akan air bersih dapat tercukupi yang berarti membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”(wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Sedangkan Kepala Desa Wates Bapak Nanta Budi Harianto juga memberikan pernyataan yang pada intinya senada dengan pernyataan di atas, yaitu:

“Saya senang dengan adanya Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat karena kebutuhan air bersih masyarakat desa dapat terbantu, coba bayangkan jika tidak ada Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat kami harus mengambil air dari desa tetangga yang mempunyai sumber air yang banyak” (wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa salah satu tujuan Pembangunan Sarana Air Bersih Masyarakat, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya telah dapat dicapai. Ini bisa dilihat dalam tabel kapasitas air bersih penduduk:

Tabel 8

## Kapasitas Air Bersih Penduduk

## Kecamatan Slahung

No.	Desa	Jumlah Kebutuhan Air Tahun (l/det)	
		2007	2010
1	Snepo	1,23	1,45
2	Slahung	4,23	4,55
3	Ngilo-ilo	1,55	1,57
4	Wates	2,76	2,98
5	Caluk	1,11	1,54

(Sumber Data: Hasil Analisa 2013)

- b. Kemampuan lembaga HIPPAM desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Sesuai dengan Instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomer 09 Tahun 1989 tanggal 23 Mei 1989, maka dibentuk suatu sistem pengelolaan air bersih oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Pelaksanaan pembangunan sarana air bersih HIPPAM ini biasanya juga ditangani oleh beberapa instansi antara lain proyek sektoral Departemen PU, Dinas Kesehatan, Dinas PU Cipta Karya, PEMKAB dan Lain-lain, dimana pengelolaannya akan dipercayakan pada HIPPAM. Sistem ini bisa dikatakan embrio dari sistem jaringan air bersih PDAM. Sifat pengelolaannya adalah semi perusahaan dalam artian tetap dibatasi dalam pengambilan keuntungan dengan tujuan pokok agar dapat membina pola berfikir masyarakat desa bahwa pada akhirnya air ini adalah “Barang Konsumsi Ekonomis”. Sedangkan tujuan dikelolanya air bersih dalam lembaga HIPPAM ini adalah:

1. Menimbulkan rasa ikut memiliki sarana yang telah dibangun didaerahnya dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat secara gotong-royong

bermusyawarah untuk bersama-sama membuat program pemeliharaan serta segala kegiatan dalam rangka melestarikan sarana yang ada.

2. Meningkatkan pengertian serta kemampuan masyarakat untuk dapat menghayati bahwa air bersih ini adalah kebutuhan pokok yang tidak begitu saja mendapatkannya.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melayani dan mencukupi kebutuhan air bersih untuk mereka sendiri dengan menggunakan sistem yang sesuai dengan kondisi setempat.
4. Diharapkan dapat mempermudah proses terbentuknya “Masyarakat Air Minum *Minded*”

Namun demikian terdapat fenomena yang menarik yang ditemui oleh peneliti karena terdapat perbedaan pendapat antara informan satu dengan yang lainnya, seperti tercermin dari hasil wawancara dengan Camat Slahung Drs. Bambang Nurcahyo, M.Si sebagai berikut:

“Semua Desa telah membentuk HIPPAM karena hal itu menjadi persyaratan dalam penyerahan sarana air bersih” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah Kecamatan Slahung telah membentuk HIPPAM guna memenuhi persyaratan serah terima pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat Desa. Namun ada pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh Ketua HIPPAM Desa Wates Bapak Matius, berikut penuturannya:

“HIPPAM dan masyarakat desa lainnya dalam musyawarah penggunaan Sarana Air Bersih lebih banyak sebagai pendengar karena lebih banyak disusun oleh Kepala Desa”(wawancara tanggal 19 Maret 2013).

Sedangkan salah satu anggota HIPPAM Desa Wates Bapak Damiran menyatakan:

“Dulu memang pernah diikuti sertakan dalam musyawarah desa penggunaan Sarana Air Bersih, namun sekarang ini seingat saya tidak pernah lagi, tahu-tahu sudah ada pembangunan sarana air bersih”(wawancara tanggal 23 Maret 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Wates Nanta Budi Harianto sebagai berikut:

“Sebenarnya desa mampu untuk menyusun HIPPAM, tapi sering ada oknum Kecamatan yang menawarkan jasa sehingga kami tinggal pasrahkan penyusunan HIPPAM semua beres” (wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Sedangkan dalam proses pelaksanaannya Lembaga HIPPAM Desa juga tidak dilibatkan. Seharusnya HIPPAM mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik. Namun dalam pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan Sarana Air Bersih, HIPPAM tidak pernah dilibatkan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan anggota HIPPAM Desa Wates Bapak Damiran sebagai berikut:

“HIPPAM itu tidak jelas tugasnya karena sejak dibentuk paling-paling kami hanya diundang rapat pak Lurah tidak pernah menjadi pelaksana pembangunan, *paling banter* diajak kerja bakti dalam pengendalian bangunan”(wawancara tanggal 23 Maret 2013).

Hal senada juga disampaikan oleh Seksi Pembangunan Kecamatan Slahung Bapak Abdul Juri yang memberikan penjelasan:

”Kepala Desa adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan sehingga Kepala Desa salah yang sering kali menjadi pelaksana kegiatan”(wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Pendapat senada lainnya juga Kepala Desa Slahung Ibu Anik Setiowati, seperti berikut ini :

”Saya adalah penanggung jawab utama jika pengendalian sarana air bersih gagal, oleh karena itu dari pada dilaksanakan oleh orang lain yang tidak jelas tanggung jawabnya, maka lebih baik kami laksanakan bersama dengan masyarakat dan HIPPAM” (wawancara tanggal 30 Maret 2013).

Lebih memprihatinkan lagi adalah terkait dengan peran lembaga HIPPAM desa dalam pengendalian kegiatan pembangunan, sebagaimana penuturan anggota HIPPAM Desa Snepo Sutrisno berikut ini :

“Kami tidak tahu apa HIPPAM memiliki kewenangan untuk bisa mengendalikan pembangunan Sarana Air Bersih”(wawancara tanggal 27 Maret 2013).

Sedangkan Ketua HIPPAM desa Snepo Setiono, menyatakan bahwa:

“Bagaimana HIPPAM bisa mengendalikan pembangunan yang dibiayai Pemerintah jika pada saat Musrenbang kami tidak dilibatkan”(wawancara tanggal 27 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa Lembaga-Lembaga HIPPAM Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dikarenakan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan Sarana Air Bersih bahkan terdapat desa yang tanpa melalui proses perencanaan sebagaimana pedoman yang ada, tidak pernah tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Bersih dan juga tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan Sarana Air Bersih.

c. Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sarana air bersih, diwilayah Kecamatan Slahung diakui oleh Camat Slahung Drs. Bambang Nurcahyo, M.Si, berikut penuturannya:

“Kita mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana air bersih rendah karena sumber daya masyarakat yang rata-rata rendah, kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung, tetapi sebagian masyarakat desa di Kecamatan Slahung membantu dalam hal tenaga” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Kepala Desa Wates

Bapak Nanta Budi Harianto, sebagai berikut:

“Kita akui bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan sarana air bersih rendah, masyarakat diajak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan susah karena banyak masyarakat yang berkerja” (wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Namun demikian juga ada pendapat informan yang berbeda, terutama yang disampaikan oleh Kepala Desa Slahung Ibu Anik Setiowati, berikut penuturannya:

“Di desa kami partisipasi masyarakat cukup bagus yang diwujudkan dalam bentuk tenaga dan material, itu terbukti ketika pembangun Sarana Air Bersih dengan dana dari Pemerintah hanya sembilan puluh lima juta namun bisa terwujud Sarana Air Bersih senilai hampir seratus lima puluh juta rupiah jika itu diproyekkan”(wawancara tanggal 30 Maret 2013)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih tidak optimal pada setiap desa yang mendapat bantuan pembangunan, padahal untuk melaksanakan misi pemerintah mewujudkan infrastuktur permukiman dan prasarana wilayah serta melaksanakan pengelolaan harus didukung secara optimal oleh partisipasi masyarakat demi menjaga keberlanjutan sarana air bersih.

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

#### a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam faktor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan pembangunan sarana air bersih.

##### 1. Intensitas Sosialisasi Kebijakan Sarana Air Bersih

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan pembangunan sarana air bersih dan pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai pembangunan sarana air bersih.

Pernyataan dari Camat Slahung Drs. Bambang Nurcahyo, M.Si berkaitan dengan sosialisasi pembangunan sarana air bersih menyatakan bahwa:

“Sosialisasi pembangunan sarana air bersih telah dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Ponorogo dan diikuti oleh Camat, Kepala Desa dan masyarakat”(wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala Desa Wates Bapak Nanta Budi

Harianto bahwa:

“Pihak Kabupaten telah memberikan sosialisasi kepada kita tentang pembangunan sarana air bersih yang akan diterima dan juga petunjuk teknis pengelolannya”(wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Namun demikian terdapat pernyataan yang berbeda dari anggota HIPPAM desa Wates Bapak Damiran, sebagai berikut :

*“Kula mboten saged matur kathah babagan bangun banyu resik kwi amargi kulo dereng nate nderek sosialiasasi lan sak ngertos kulo pak lurah nggih dereng nate sosialisasi kaleh masyarakat, paling-paling kumpulan mbahas kerja bakti mawon”* (wawancara tanggal 23 Maret 2013).

Pernyataan yang senada dengan anggota HIPPAM desa Wates juga disampaikan oleh Kepala Desa Wates Bapak Nanta Budi Harianto, berikut pernyataannya:

”Kita memang tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program pembangunan sarana air bersih ini, karena saya berfikir perwakilan masyarakat sudah kita ajak rembug bersama untuk menentukan pembangunan sarana air bersih” (wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kurang adanya intensitas sosialisasi kebijakan pembangunan sarana air bersih karena sosialisasi hanya dilakukan oleh Tim Kabupaten kepada Camat, Kepala Desa, dan Pengurus HIPPAM Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Anggota HIPPAM Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada.

## 2. Kejelasan Komunikasi

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan oleh para komunikator atau penyampai pesan, berikut akan dijelaskan oleh Sekretaris HIPPAM Desa Wates Bapak Poniran, yaitu:

“Masalah penggunaan sarana air bersih, kami sebagai Sekretaris HIPPAM Desa tidak mengalami berbagai kesulitan, namun pada tataran administrasi pertanggungjawaban keuangan, terus terang kami masih mengalami kebingungan” (wawancara tanggal 23 Maret 2013).

Sedangkan Ketua HIPPAM Desa Slahung Bapak Adi Purnomo menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah jelas semua mas” (wawancara tanggal 25 Maret 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Slahung Ibu Anik Setiowati berikut ini pernyataannya:

”Apanya lagi yang tidak jelas, semua sudah ada dalam juknis (petunjuk teknis), kalau lupa tinggal baca ya tho pak? (wawancara tanggal 30 Maret 2013).

Sedangkan Kepala Desa Caluk V. Agung Suhardi juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

“Sudah hampir tiga tahun kita menerima pembangunan sarana air bersih sehingga menurut saya sudah jelas” (wawancara tanggal 1 April 2013).

Pernyataan para informan di atas juga senada dengan pernyataan Camat Slahung Drs. Bambang Nurcahyo, M.Si yaitu:

“Sudah...sudah jelas semuanya dan setelah sosialisasi tidak ada yang tanya sama kami sehingga bisa disimpulkan sudah jelas semua” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa terdapat adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan pembangunan sarana air bersih.

### 3. Konsistensi Pesan

Sementara itu ketika ditanyakan tentang konsistensi penyampaian pesan, Kepala Desa Slahung Ibu Anik Setiowati memberikan pernyataan berikut:

“Kami merasa tidak ada yang tumpang tindih penjelasan Tim Kabupaten dengan ketentuan yang ada” (wawancara tanggal 30 Maret 2013).

Sedangkan Kepala Desa Caluk V. Agung Suhardi menyatakan:

“Hal-hal yang tidak diperkenankan dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih sudah kami patuhi semua, hal itu dikarenakan sosialisasi sangat jelas dan juga sesuai penjelasan bapak Camat”(wawancara tanggal 1 April 2013).

Demikian juga Kepala Desa Snepo Bapak Lasmono juga memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

“Saya telah melaksanakan musyawarah desa untuk membuat HIPPAM dan hasilnya dapat dilihat apa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, itu semua kami lakukan atas petunjuk dan Kabupaten dan Kecamatan”(wawancara tanggal 27 Maret 2013).

Ketika pernyataan dari para informan mengenai konsistensi informasi ini disampaikan kepada Camat Slahung Drs. Bambang Nurcahyo, M.Si, beliau membenarkan pernyataan para informan, berikut pernyataannya:

“Memang tidak ada perbedaan informasi dan perintah mengenai pengendalian sarana air bersih semua disesuaikan dengan petunjuk Bupati”(wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan.

Dari hasil penelitian fenomena komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Intensitas sosialisasi kebijakan pembangunan sarana air bersih masih kurang karena sosialisasi hanya dilaksanakan oleh Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada Camat, Pengurus HIPPAM, dan Kepala Desa sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Anggota HIPPAM dan warga masyarakat lainnya tidak ada. Adapun kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa ketentuan dalam petunjuk teknis pembangunan sarana air bersih telah jelas diterima oleh para pelaksana. Demikian juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain.

b. Sumber Daya

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan pembangunan sarana air bersih, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan pendukung Kebijakan Sarana Air Bersih. Lebih lanjut tentang sumber daya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini:

1. Kemampuan Sumberdaya Manusia.

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia Camat Slahung Drs. Bambang Nurcahyo, M.Si menyatakan:

“Memang pendidikan dari para pelaksana pembangunan sarana air bersih sangat mempengaruhi kualitas pelaksanaan pengendalian sarana air bersih. Ketika mereka kita ajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi mereka lambat untuk mengikuti, maklum aja pendidikan mereka sebageian besar SLTP”(wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Wates Bapak Nanta Budi Harianto, sebagai berikut:

“Kita akui dengan pendidikan yang hanya SLTP saya kesulitan dalam penyusunan HIPPAM yang baik meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil seadanya kami mampu selesaikan”(wawancara tanggal 17 Juni 2008).

Demikian juga Seksi Pembangunan Kecamatan Slahung Bapak Abdul Juri menyampaikan:

“Para pelaksana pembangunan sarana air bersih belum sesuai dengan standar kompetensi, karena mereka rata-rata berpendidikan hanya SLTP, mereka hanya menang dalam pengalaman” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Namun demikian ketika para informan ditanya yang terkait dengan kemampuan untuk mendorong masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian sarana air bersih, mereka memberikan pernyataan yang senada.

Adapun pernyataan Kepala Desa Slahung Ibu Anik Setiowati sebagai berikut :

“Saya adalah Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat saya sangat mematuhi apa yang saya sampaikan termasuk kaitannya dengan pengendalian sarana air bersih” (wawancara tanggal 30 Maret 2013).

Sedangkan ketua HIPPAM Desa Slahung Bapak Adi Purnomo memberikan pernyataan yang mendukung pernyataan dari Kepala Desa Slahung sebagai berikut:

“Bu Lurah memang pintar ngajak masyarakat untuk gotong royong, karena dia mau turun langsung dan tidak *angel* untuk belikan rokok” (wawancara tanggal 25 Maret 2013).

Camat Slahung Bambang Nurcahyo, M.Si juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya:

“Pendidikan para pelaksana pengendalian sarana air bersih memang rendah, tapi peran Kepala Desa dalam mengajak partisipasi masyarakat sangat tinggi, meskipun kondisi masyarakat Slahung tidak memungkinkan swadaya melalui uang tapi gotong royong masyarakat masih tinggi, sekali lagi dibutuhkan kemampuan Kepala Desa untuk menggerakkan masyarakat” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Sedangkan pernyataan yang senada dari Seksi Pembangunan Kecamatan

Slahung Bapak Abdul Juri, adalah sebagai berikut :

“Masyarakat Slahung masih manut dengan Kepala Desa” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Sedangkan terkait dengan kemampuan pelaksana kebijakan Sarana Air Bersih dalam melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Berikut ini pernyataan dari Kepala Desa Wates Nanta Budi Harianto:

“Kami tahu persis masalah dalam pelaksanaan pengendalian sarana air bersih, yaitu jumlah partisipasi masyarakat yang tidak sebanding dengan permasalahan pengendalian dan yang kami lakukan adalah dengan menyusun skala prioritas, yah...yang penting dulu yang kami dahulukan”(wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Sedangkan Seksi Pembangunan Kecamatan Slahung Bapak Abdul Juri memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Kecamatan sering memfasilitasi permasalahan pelaksanaan pengendalian sarana air bersih karena Kepala Desa dan Perangkatnya kurang mampu untuk menyelesaikan dengan cepat” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan pembangunan sarana air bersih dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan

menyelesaikan masalah dengan cepat, namun demikian mereka mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

## 2. Pendukung Kebijakan Sarana Air Bersih

Berkaitan dengan pendukung kebijakan pembangunan sarana air bersih, pada prinsipnya para informan menyadari bahwa permasalahan utama pelaksanaan pembangunan sarana air bersih adalah kurang adanya dukungan dana dari masyarakat desa, sebagaimana pernyataan Camat Slahung Bapak Bambang Nurcahyo, M.Si berikut ini:

“Desa-desa di wilayah Slahung tidak dapat mengandalkan dana operasional pengelolaan sarana air bersih dari masyarakat desa” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Demikian juga Kepala Desa Wates Bapak Nanta Budi Harianto menyatakan:

“Apa yang bisa diberikan masyarakat desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sarana air bersih, lha pendapatan aja rata-rata hanya cukup untuk makan” (wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Sedangkan Kepala Desa Slahung Ibu Anik Setiowati memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Ada kok dukungan terhadap pembangunan sarana air bersih, contohnya tenaga dari masyarakat dalam pembangunan ini sangat membantu kami untuk ngurus pembangunan” (wawancara tanggal 30 Maret 2013).

Pernyataan senada dari Kepala Desa Caluk Bapak V. Agung Suhardi memberikan pernyataan kepada peneliti mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan sarana air bersih, sebagai berikut pernyataannya:

“Dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih, masyarakat turut memberikan dukungan berupa tenaga dan material, ada yang berupa nasi, jajanan, rokok, bahkan ada yang nyumbang pasir dan batu” (wawancara tanggal 1 April 2013).

Sedangkan Ketua HIPPAM desa Slahung Bapak Adi Purnomo memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Dukungan masyarakat cukup tinggi terbukti ketika pembangunan, masyarakat ikut menyumbang meskipun sebagian besar berupa tenaga, namun ada juga yang nyumbang material”(wawancara tanggal 25 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pendukung kebijakan Sarana Air Bersih masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih melalui tenaga dan material.

Dari hasil penelitian fenomena sumber daya di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan pengendalian sarana air bersih karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian terhadap pendukung terungkap bahwa masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan penengendalian sarana air bersih melalui tenaga dan material.

#### c. Sikap Pelaksana

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan pembangunan sarana air bersih. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut:

## 1. Persepsi Pelaksana

Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan pembangunan sarana air bersih disampaikan oleh Kepala Desa Wates Bapak Nanta Budi Harianto sebagai berikut :

“Saya berharap pembangunan sarana air bersih tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi kami sarana tersebut sangat berguna”(wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Snepo Bapak Lasmono sebagai berikut pernyataannya:

“Penting sekali mas.....karena sangat dibutuhkan bagi desa kami” (wawancara tanggal 27 Maret 2013).

Demikian juga Sekdes Wates Bapak Priono memberikan pernyataan yang senada sebagai berikut:

“Persepsi kami jelas baik tho mas, karena demi kemajuan desa dengan pembangunan sarana air bersih masyarakat juga lebih mudah dalam pengadaan airnya” (wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Pernyataan senada lainnya juga disampaikan oleh Camat Slahung Bapak Bambang Nurcahyo, M.Si sebagai berikut:

“Saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Slahung akan memiliki persepsi yang sama terhadap kebijakan Sarana Air Bersih, yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap pembangunannya akan semakin ditingkatkan”(wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Sedangkan Seksi Pembangunan Kecamatan Slahung Bapak Abdul Juri menyatakan:

“Benar mas para kades dan masyarakat akan terus berharap bahwa Pemerintah Kabupaten akan terus membuat kebijakan pemberian Sarana Air Bersih kepada desa-desa”(wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan Sarana Air Bersih mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan pembangunan sarana air bersih terus digulirkan bahkan ditingkatkan.

## 2. Respon Pelaksana

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, para informan memberikan pernyataan yang berbeda. Adapun pernyataan Ketua HIPPAM desa Slahung Adi Purnomo bahwa adanya respon pelaksana terhadap kebijakan Sarana Air Bersih sebagai berikut:

“Pak Lurah sangat respon terhadap pembangunan sarana air bersih, buktinya mampu memanfaatkan dana pembangunan yang kecil untuk membangun sarana air bersih yang tadi sudah saya ceritakan proses pembangunannya” (wawancara tanggal 25 Maret 2013).

Sedangkan Ketua HIPPAM desa Caluk Bapak Setiono memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Setelah menerima pembangunan sarana air bersih pak Lurah terus segera melaksanakan kegiatannya” (wawancara tanggal 1 April 2013).

Adapun Kepala Desa Caluk V. Agung Suhardi juga mempunyai pernyataan yang senada sebagai berikut:

“Sebelum pembangunan diserahkan kepada kami, kami sudah sanggup menyelesaikan kegiatan sampai seratus persen” (wawancara tanggal 1 April 2013).

Sedangkan pernyataan informan yang menyatakan kurangnya respon pelaksana terhadap kebijakan Sarana Air Bersih, sebagaimana pernyataan Anggota HIPPAM Wates Bapak Damiran berikut ini:

“Pak Lurah itu menurut pengamatan saya kurang respon terhadap pembangunan sarana air bersih karena ndak pernah ngurusi pelaksanaan pengendalian sarana air bersih”(wawancara tanggal 23 Maret 2013).

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Kades Snepo Bapak Lasmono sebagai berikut:

“Pembangunan kan sudah beberapa tahun jadi ya begitulah, kami pasrahkan Kecamatan untuk menyusun HIPPAM”(wawancara tanggal 27 Maret 2013).

Demikian juga Ketua HIPPAM Snepo Bapak Setiono memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya:

“Ndak ada respon blas mas, ngurusi HIPPAM aja tidak pernah”(wawancara tanggal 27 Maret 2013).

Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut di atas dikonfirmasi dengan pernyataan Camat Slahung didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya:

“Yah begitulah mas ada yang respon terhadap pengendalian sarana air bersih karena itu segera melaksanakan kegiatan yang ada, namun ya ada yang kurang respon, buktinya untuk melengkapi persyaratan penyerahan sarana pembangunan saja susahya bukan main” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan Sarana Air Bersih, karena menganggap Pembangunan sudah menjadi tanggung jawab HIPPAM.

### 3. Tindakan Pelaksana

Meskipun ada pelaksana kebijakan Srana Air Bersih yang kurang respon, namun demikian semua informan menyatakan bahwa pelaksana pembangunan

sarana air bersih telah membuat kegiatan dan langkah-langkah, sebagaimana pernyataan Kades Slahung Ibu Anik Setiowati berikut:

“Sarana air bersih kami manfaatkan untuk memnuhi kebutuhan air bersih masyarakat dan untuk pemberdayaan masyarakat, antara lain menanamkan pentingnya air bersih”(wawancara tanggal 30 Maret 2013).

Sedangkan Kades Caluk V. Agung suhardi menyatakan :

“Kegiatan dan langkah-langkah kami sudah tertera dalam AD/ART HIPPAM”(wawancara tanggal 1 April 2013).

Demikian juga Sekdes Caluk Bapak Anang Widodo memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut :

”Ada banyak mas, antara lain untuk menunjang kebutuhan air bersih desa serta bisa untuk membantu desa tetangga dalam pengadaan air bersih” (wawancara tanggal 1 April 2013).

Camat Slahung Bapak Bambang Nurcahyo, M.Si juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya:

“Kalau bicara kegiatan semua desa telah membuat kegiatan dan melaksanakannya” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Demikian juga ada pernyataan yang senada dari Seksi Pembangunan Kecamatan Slahung Bapak Abdul Juri sebagai berikut:

“Semua punya kegiatan baik untuk operasional HIPPAM Desa maupun untuk pemberdayaan masyarakat” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan HIPPAM, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional HIPPAM Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi pentingnya air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana memiliki sikap yang baik terhadap kebijakan Sarana Air Bersih dan sangat mendukung serta mengharapkan pembangunan sarana air bersih terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan Sarana Air Bersih, karena menganggap pembangunan sarana air bersih menjadi tanggung jawab HIPPAM. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan HIPPAM, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional HIPPAM Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa sosialisasi pentingnya air bersih untuk kehidupan sehari-hari.

#### d. Struktur Organisasi Pelaksana

Dalam hal struktur organisasi pelaksana kebijakan organisasi, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksana kebijakan Sarana Air Bersih. Meskipun demikian perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari para pengelola sarana air bersih/ Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Lebih lanjut hasil penelitian tentang struktur organisasi pelaksana kebijakan Sarana Air Bersih ini disampaikan oleh para informan sebagai berikut:

## 1. Pembentukan Struktur Organisasi

Hasil penelitian penulis terhadap pembentukan struktur organisasi HIPPAM sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Slahung Ibu Anik Setiowati berikut ini:

“Sudah ada struktur organisasi dalam pengelolaan sarana air bersih dan hal itu sebagai syarat penyerahan sarana air bersih”(wawancara tanggal 30 Maret 2013).

Sedangkan Kepala Desa Caluk Bapak V. Agung suhardi memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Ada strukturnya , saya selaku Pembina, Matius adalah wakil masyarakat sebagai Kepala HIPPAM dan ada Bendaharanya dan Sekertarisnya” (wawancara tanggal 1 April 2013).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Camat Slahung Bapak sebagai berikut:

“Sesuai dengan petunjuk teknis sudah terdapat Tim Pengelola sarana air bersih ditingkat desa, adalah HIPPAM dan masyarakat sebagai anggotanya”(wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Pernyataan lain yang senada juga disampaikan oleh Seksi Pembangunan Kecamatan Slahung Bapak Abdul Juri sebagai berikut:

“Semua desa telah membentuk organisasi HIPPAM dalam kegiatan pengelolaan sarana air bersih bahkan ada honor untuk mereka”(wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pengelolaan sarana air bersih telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Kebijakan Sarana Air Bersih yang dikeluarkan oleh Bupati.

## 2. Pembagian Tugas

Hasil penelitian terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Ketua HIPPAM desa Wates Bapak Matius sebagai berikut:

“Dalam juknis Bupati seharusnya pengelolaan sarana air bersih ditangani oleh Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), namun kenyataannya HIPPAM tidak pernah dilibatkan”(wawancara tanggal 19 Maret 2013).

Sekretaris HIPPAM Desa Wates Bapak Poniran memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut pernyataannya :

“Menurut saya tidak ada pembagian tugas yang jelas, sehingga sepertinya pak Lurah saja yang menangani semua”( wawancara tanggal 19 Maret 2013).

Adapun Kepala HIPPAM Desa Snepo Bapak Setiono juga memberikan pernyataan yang senada, yaitu:

“Saya ndak tahun apa-apa tentang tugas HIPPAM dalam pelaksanaan pengelolaan sarana air bersih, yang penting dapat honor”(wawancara tanggal 17 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksana pengelolaan sarana air bersih belum melakukan pembagian tugas, sehingga Pengurus HIPPAM Desa tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan pengendalian sarana air bersih.

## 3. Koordinasi Para Pelaksana kebijakan

Hasil penelitian penulis terhadap koordinasi para pelaksana Kebijakan Sarana Air Bersih disampaikan dalam pernyataan Kepala HIPPAM Desa Wates Bapak Matius, sebagaimana pernyataan berikut:

“Pak Lurah itu sukanya bekerja sendiri sehingga saya tidak tahu apa yang mesti saya kerjakan dalam pelaksanaan pengendalian sarana air bersih”(wawancara tanggal 19 Maret 2013).

Sedangkan Sekretaris HIPPAM Desa Wates Bapak Poniran memberikan pernyataan terkait koordinasi pelaksana Kebijakan Sarana Air Bersih sebagai berikut:

“Pak Lurah memang menugaskan saya untuk menyelesaikan laporan iuran masyarakat terkait pelaksanaan pengendalian sarana air bersih, tapi saya tidak bisa menyelesaikan karena dananya dipakai apa saja tidak pernah diberitahukan saya” (wawancara tanggal 23 Maret 2013).

Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut dikaitkan dengan pernyataan Camat Slahung Bapak Bambang Nurcahyo, M.Si didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya:

“Sebenarnya dalam juknis Pembangunan Sarana Air Bersih telah diatur pembagian tugas diantara para pelaksana pengendalian sarana air bersih, namun persoalan koordinasi sering tidak jalan. Hal ini sering disebabkan kurang saling percaya” (wawancara tanggal 13 Maret 2013).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana pengendalian sarana air bersih salah satu penyebab dikarenakan adanya ketidakpercayaan diantara mereka.

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur organisasi pelaksana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah ada pembentukan struktur organisasi pelaksana pengelola sarana air bersih sesuai dengan petunjuk teknis Pembangunan Sarana Air Bersih yang dikeluarkan oleh Bupati. Namun demikian hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana pengendali sarana air bersih, melakukan pembagian tugas, sehingga HIPPAM Desa tidak mengerti akan tugas dan

kewenangannya dalam pelaksanaan Pengendalian Sarana Air Bersih. Demikian juga hasil penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik, diantara para pelaksana HIPPAM menjadi salah satu penyebab dikarenakan adanya ketidakpercayaan diantara mereka.

#### **D. Pembahasan**

Pada sub bab ini, penulis akan membahas implementasi Kebijakan Sarana Air Bersih dalam hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Pertama pembahasan implementasi dari aspek *compliance*, yaitu sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga HIPPAM di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

##### **1. Implementasi Kebijakan Sarana Air Bersih.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, kesimpulan pada proses implementasi kebijakan di atas, bahwa proses implementasi kebijakan pembangunan sarana air bersih masyarakat di Kecamatan Slahung telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah tersusunya daftar kegiatan pembangunan sarana air bersih, adanya penyelesaian kegiatan pembangunan

sarana air bersih serta telah disusunnya HIPPAM sebagai pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana air bersih.

Maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan sarana air bersih ini telah terpenuhi, yaitu semua desa yang mengikuti Musrenbang dapat melaksanakan kebijakan sarana air bersih dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn dalam (Winarno, 2002: 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implementasi kebijakan Sarana Air Bersih telah mencapai tujuan? dapat dikatakan bahwa tujuan pembanguna sarana air bersih belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan pembanguna sarana air bersih. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Slahung adalah desa yang dikategorikan langka akan air bersih sehingga sangat membutuhkan bantuan pembangunan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan data yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Slahung, yaitu beberapa desa di Kecamatan Slahung mengalami kesulitan dalam pengadaan air bersih, setelah mendapatkan pembangunan sarana air bersih beberapa desa sudah tidak termasuk desa rawan air bahkan bisa membantu disaat desa tetangga membutuhkan pemenuhan air bersih. Maka

pembangunan Sarana Air Bersih sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua peningkatan kemampuan lembaga HIPPAM di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga HIPPAM Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan mulai dari belum adanya rasa ikut memiliki sarana yang telah dibangun didaerahnya, serta kurangnya kemampuan masyarakat untuk dapat menghayati bahwa air bersih ini adalah kebutuhan pokok yang tidak begitu saja mendapatkannya dan dikarenakan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan Sarana Air Bersih. Akibatnya masyarakat akan merasa bahwa sarana tersebut seperti fasilitas pemerintah pada umumnya kepada masyarakat, sehingga apabila ada kerusakan maka akan menunggu pemerintah untuk memperbaiki sarana tersebut dan bangunan tidak akan terjaga keberlanjutannya.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan sarana air bersih masyarakat sangat sulit untuk membantu, ini dikarenakan sumber daya masyarakat yang rata-rata masih rendah serta kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung karena masyarakat banyak yang berkerja. Akibatnya untuk pengendalian bangunan sarana air bersih banyak desa yang mengalami kesulitan untuk memperbaiki apabila terdapat kerusakan.

Dengan hasil penelitian terhadap fenomena pencapaian tujuan kebijakan pembangunan sarana air bersih di atas, yaitu adanya peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi Lembaga-Lembaga HIPAM Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih tidak optimal, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan pembangunan sarana air bersih belum berjalan secara optimal.

Suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah (Winarno, 2002: 29). Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap fenomena implementasi kebijakan, yaitu proses implementasi kebijakan pembangunan sarana air bersih dan pencapaian tujuan kebijakan pembangunan sarana air bersih dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan sarana air bersih telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian implementasinya belum dapat mencapai tujuan kebijakan secara optimal

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih

### a. Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:157) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

4. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
5. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
6. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan pembangunan sarana air bersih, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.

2. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
3. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Sarana Air Bersih belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai pengendalian sarana air bersih kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih maupun dalam pengendalian sarana air bersih.

#### b. Sumber daya dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut “Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif”.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006: 158), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- d. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan

jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

- e. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- f. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

. Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan pembangunan sarana air bersih, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- 1) Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sarana air bersih, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- 2) Adanya kemampuan pelaksana kebijakan Sarana Air Bersih dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih.
- 3) Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan Sarana Air Bersih berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana pengendalian sarana air bersih, sehingga pemahaman pelaksana mengenai pembangunan dan pengendalian kurang, serta kurangnya dukungan finansial dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

#### c. Sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut ” Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit”. Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun

para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Kebijakan Sarana Air Bersih, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- 1) Adanya persepsi pelaksana yang mendukung Kebijakan Sarana Air Bersih
- 2) Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana Kebijakan Sarana Air Bersih, berupa pembentukan HIPPAM dan pelaksanaan kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana pembangunan sarana air bersih yaitu masyarakat yang menganggap Kebijakan Sarana Air Bersih adalah tanggungjawab HIPPAM saja.

d. Struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982: 293).

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena

kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memerhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implemntasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan pengendalian sarana air bersih, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) disemua desa, yaitu Kepala Desa selaku Pembina Kegiatan, dan masyarakat menjadi Kepala, Sekertaris, Bendahara HIPPAM dan Anggota HIPPAM Desa. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana HIPPAM dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana HIPPAM.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Musyawarah Penyusunan Pembangunan (Musrenbang), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Pembangunan sarana air bersih Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Pembangunan sarana air bersih Desa, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga HIPPAM desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Bersih di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.
  - a. Faktor Komunikasi

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
2. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
3. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Sarana Air Bersih belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai pengendalian sarana air bersih kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih maupun dalam pengendalian sarana air bersih

b. Faktor Sumber Daya

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

1. Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sarana air bersih, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
2. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan Sarana Air Bersih dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan pembangunan sarana air bersih.
3. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan Sarana Air Bersih berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana pengendalian sarana air bersih, sehingga pemahaman pelaksana mengenai pembangunan dan pengendalian kurang, serta kurangnya dukungan finansial dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

c. Faktor Sikap Pelaksana

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

1. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung Kebijakan Sarana Air Bersih
2. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana Kebijakan Sarana Air Bersih, berupa pembentukan HIPPAM dan pelaksanaan kegiatan operasional dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurang responnya para pelaksana pembangunan sarana air bersih yaitu masyarakat yang menggangap Kebijakan Sarana Air Bersih adalah tanggungjawab HIPPAM saja.

d. Faktor Struktur Organisasi

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) disemua desa, yaitu Kepala Desa selaku Pembina Kegiatan, dan masyarakat menjadi Kepala, Sekertaris, Bendahara HIPPAM dan Anggota HIPPAM Desa. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara

Tim pelaksana HIPPAM dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana HIPPAM.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan pembangunan sarana air bersih di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo masa datang. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Sosialisasi terhadap kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan Pembangunan Sarana Air Bersih, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, dan ikut mengendalikan hasil pembangunan serta ikut mengawasi jalannya pengendalian sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga HIPPAM khususnya dalam pelaksanaan Pengendalian Sarana Air Bersih, sehingga HIPPAM tidak diartikan sebagai "*second line*" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai "*lembaga konspirasi*".

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Malang: Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Adam Ibrahim Indra Wijaya. 2000. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Adhibaswara, Banu. 2011. *Pengelolaan Air Secara Ekonomis Dengan Penggunaan Tanggul Batang Kelapa Serta Penjernih Air Alami*. Jawa Barat: Universitas Gunadarma
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- D., Riant nugroho.(2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Efferin, Sudjoko., Stevanus Hadi Darmadji, dan Yuliawati Tan. 2004. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi: Sebuah Pendekatan Praktis*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Halim, Abdul. 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Gibson, James L. 1993. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Persada.
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, Drs, M.Si. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Islamy, M. Irfan. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Ed.10. Jakarta: Bumi Aksara
- Kodoatie, Robert J, dkk. 2002. *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Narbuko, C. dan Achmadi, A. 2003. *Metode Penelitian kualitatif (ed.2)*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Mar'at. 1982. *Manusia Perubahan dan Pengukuran*. Bandung: Galia Indonesia.
- Milles, dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Tentang Metode-Metode Baru*, diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

- \_\_\_\_\_. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Ed.10. Jakarta: PT. Indeks.
- Simatupang, Togar. M. 1995. *Teori Sistem Suatu Perspektif Teknik Industri*. Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Soerjono, Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Steers, Ricard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Ed.2. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 1994. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfa Beta.
- Sumiyarsono, Elmi. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suripin. 2001. *Pelestarian Sumberdaya Tanah dan Air*. Yogyakarta: Andi Press.
- Sutarto. 1995. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Umar, Husein. 2001. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibawa, Samodra. 1992. *Beberapa Konsep untuk Administrasi Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wiratmo, Masykur. 1996. *Pengantar Kewiraswastaan: Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis*. Yogyakarta: BPFE
- Yudo, Satmoko. 2009. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih Dan Air Limbah Domestik*. Jakarta: Pusat Teknologi Lingkungan, BPD Teknologi.
- Ditjen Cipta Karya. (2010). *Rekapitulasi Progam Pelayanan Air Bersih Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Departemen PU.
- Undang-Undang No.7 Tahun 2004. "Sumber Daya Air pada Bab I Pasal 5", diakses tanggal 15 April 2013 dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18262/node/>
- Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. "Dijamin bahwa penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007. “Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pasal 1”, diakses tanggal 4 April 2013 dari <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum.asp?ID=8>

\_\_\_\_\_. “Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bab V”, diakses tanggal 4 April 2013 dari <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum.asp?ID=8>

\_\_\_\_\_. “Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bab VI”, diakses tanggal 4 April 2013 dari <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum.asp?ID=8>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/M/2007. “Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur”, diakses tanggal 10 April 2013 dari <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum.asp?ID=8>

Kepmenkes RI No. 907/MENKES/SK/VII/2002. “Menyebutkan bahwa kualitas air ditinjau dengan parameter bau, rasa, kekeruhan dan warna”, diakses tanggal 10 April 2013 dari <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum.asp?ID=8>

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005. “Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum”, diakses tanggal 15 April 2013 dari <http://www.nawasis.com/pp-162005-pengembangan-sistem-penyediaan-air-minum.html>

